SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2026

TENTANG

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah pembangunan kependudukan di daerah secara terukur, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi diperlukan peta jalan pembangunan kependudukan guna mewujudkan masyarakat yang berdaya, sejahtera dan berketahanan menuju Lampung Barat maju dan berwawasan kependudukan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045;

b. bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan koordinasi dan sinergi yang erat antar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 452);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kabupaten Lampung Barat ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
4. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi Kependudukan.
5. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya di singkat PJPK adalah dokumen operasional dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang berisi arah kebijakan, strategis, dan sasaran pembangunan kependudukan dalam jangka menengah lima tahunan di tingkat daerah.

Pasal 2

PJPK disusun bertujuan untuk:
a. menjaga struktur penduduk tumbuh seimbang;
b. pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
c. meningkatkan kualitas keluarga untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan masa depan yang sejahtera dan bahagia;
d. distribusi penduduk yang seimbang secara spasial, ekologis dan sosial; dan
e. memperluas cakupan administrasi kependudukan untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.

BAB II
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pasal 3

(1) PJPK Daerah Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Sasaran Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029
Bab III : Rencana Aksi Tahun 2025-2029
Bab IV : Penutup

(2) Uraian dari sistematika PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
STRATEGI PELAKSANAAN PJPK

Pasal 4

Strategi pelaksanaan PJPK disusun melalui 5 (lima) pilar sebagai berikut:
a. pertumbuhan penduduk yang seimbang;
b. peningkatan kualitas penduduk;
c. pembangunan keluarga berkualitas;
d. pemerataan penduduk; dan
e. tertib administrasi kependudukan.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian PJPK dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPK.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan dan program PJPK bersumber dari :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 mei 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 18 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

ttd.

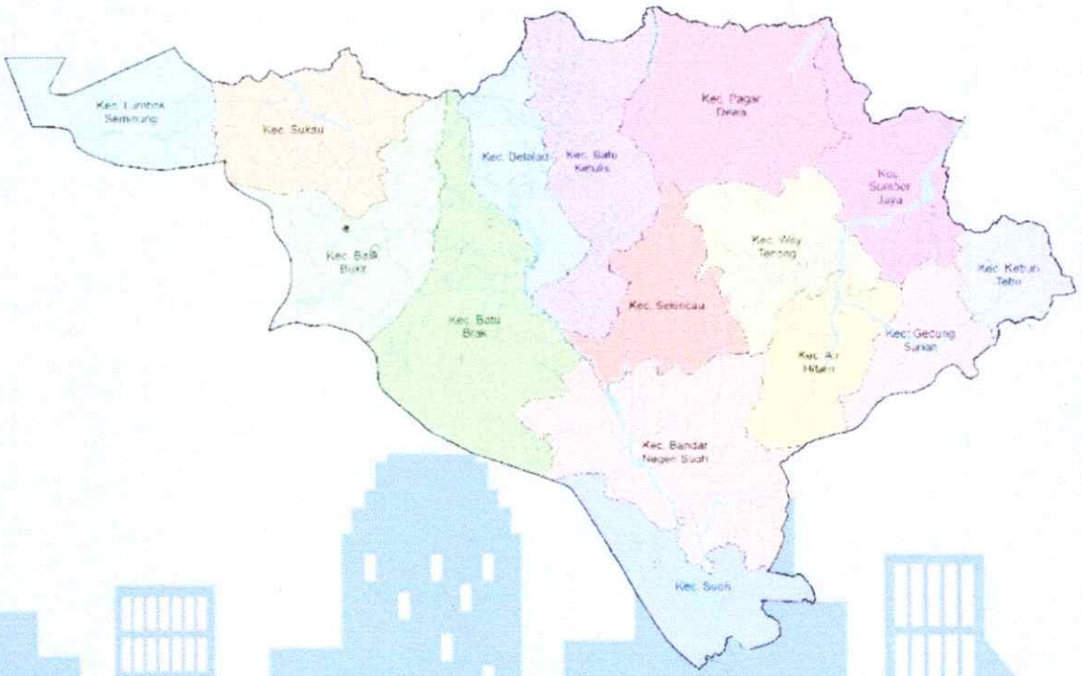
NUKMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2026 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, SH.,MM
NIP. 19731028 200003 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 20 TAHUN 2026
TENTANG : PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAERAH TAHUN 2025-2029



PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

2025-2029

KABUPATEN LAMPUNG BARAT



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 dapat disusun dengan baik.

Pembangunan Kependudukan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang menempatkan penduduk tidak hanya sebagai objek, tetapi juga subjek utama pembangunan. Oleh karena itu, penyusunan roadmap ini menjadi sangat penting sebagai arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah implementatif dalam mengelola dinamika kependudukan di Kabupaten Lampung Barat

Dokumen ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi, proyeksi serta tantangan kependudukan di Kabupaten Lampung Barat, sekaligus menjadi acuan dalam perumusan program dan kegiatan lintas sektor. Dengan adanya roadmap ini, diharapkan terwujud sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan penduduk yang berkualitas, produktif dan berdaya saing.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik melalui pemikiran, data maupun saran konstruktif. Semoga dokumen ini dapat menjadi rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kependudukan di Kabupaten Lampung Barat demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan.

Lampung Barat, 18 Mei 2026
Bupati Lampung Barat

ttd.

Hi. Parosil Mabsus

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Tujuan dan sasaran 3
1.3. Dasar Hukum 3
1.4. Batasan Pengertian 4
1.5. Perkembangan dan Situasi Kependudukan di Kabupaten Lampung Barat 6
1.6. Isu Strategis Kependudukan di Kabupaten Lampung Barat 21
1.7. Analisis isu strategis dan respon kebijakan Menggunakan Metode PSRI (Pressure, State, Respon and Impact) 22

BAB II. SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 35
2.1. Sasaran I: Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang 46
2.2. Sasaran II: Peningkatan Kualitas Penduduk 46
2.3. Sasaran III: Pembangunan Keluarga yang Berkualitas 47
2.4. Sasaran IV: Pemerataan Penduduk 48
2.5. Sasaran V: Tertib Administrasi Kependudukan 48

BAB III RENCANA AKSI 49
3.1. Mekanisme Kerja Pelaksanaan Peta Jalan dan Rencana Aksi 49
3.2. Kerangka Kelembagaan 50
3.3. Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan 53

BAB IV. PENUTUP 54
4.1. Pemantauan 54
4.2. Evaluasi 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2024 6

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2015-2024 7

Tabel 3. Penduduk dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2024 9

Tabel 4. Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 10

Tabel 5. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2024 12

Tabel 6. Kepadatan Penduduk (Population Density) dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020-2024 (per km^2) 13

Tabel 7 Proyeksi Penduduk Laki-laki Tahun 2025-2045 Dirinci Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Lampung Barat 14

Tabel 8. Proyeksi Penduduk Perempuan Tahun 2025-2045 dirinci Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Lampung Barat 15

Tabel 9. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2045 Dirinci Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Kabupaten Lampung Barat 17

Tabel 10. Kelompok Penduduk Produktif Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2024 19

Tabel 11. Kelompok Penduduk Tidak Produktif Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2024 19

Tabel 12 Capaian Indikator Kinerja Utama Peta Jalan GDPK Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020- 2024 Terhadap target Nasional 20

Tabel 13 Hasil Analisis Peta Jalan Kependudukan Menggunakan Metode PSRI di Kabupaten Lampung Barat 24

Tabel 14 Target Kinerja Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 36

Tabel 15 Rencana Aksi pada masing-masing Indikator Pembangunan kependudukan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 40

Tabel 16 Indikator & Target : Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang..... 46

Tabel 17 Indikator & Target : Peningkatan Kualitas Penduduk..... 46

Tabel 18 Indikator dan target: Pembangunan Keluarga yang Berkualitas..... 47

Tabel 19 Indikator dan target: Pemerataan Penduduk..... 48

Tabel 20 Indikator dan target: Tertib Administrasi Kependudukan 48

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kependudukan merupakan salah satu aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan daerah, karena penduduk bukan hanya objek, tetapi juga subjek utama pembangunan. Di satu sisi, jumlah, struktur, distribusi, serta kualitas penduduk akan sangat menentukan arah dan keberlanjutan pembangunan daerah. Sebaliknya, tanpa pengelolaan kependudukan yang terencana, terukur, dan berkesinambungan, potensi kependudukan dapat menjadi beban pembangunan.

Kabupaten Lampung Barat sebagai daerah otonom yang terus berkembang menghadapi berbagai dinamika kependudukan, mulai dari pertumbuhan jumlah penduduk, distribusi yang belum merata, tingkat kualitas sumber daya manusia, hingga mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri, baik dalam penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, maupun dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan daya dukung lingkungan dan daya tampung wilayah.

Jumlah penduduk . Kabupaten Lampung Barat terus mengalami peningkatan dari 302.140 jiwa pada tahun 2020, naik menjadi 302.740 jiwa pada tahun 2021, dan meningkat menjadi 303.400 jiwa pada 2022. Estimasi terbaru per pertengahan tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk telah mencapai 313.756 jiwa. Tren peningkatan ini disertai laju pertumbuhan yang konsisten yaitu sekitar 0,20% (2020), meningkat sedikit menjadi 0,21% (2022), dan sekitar 0,95% pada 2024 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar 1,20%.

Kenaikan jumlah penduduk membawa konsekuensi terhadap penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, serta infrastruktur dasar. Demikian pula distribusi penduduk dan umur produktif menjadi faktor penting yang perlu dikaji secara mendalam agar distribusi pembangunan bisa lebih merata dan inklusif. Selain persoalan kualitas penduduk yang tidak selalu seiring dengan pertumbuhan kuantitas, Kabupaten Lampung Barat juga menghadapi dinamika kependudukan yang mencerminkan potensi sekaligus tantangan besar bagi pembangunan daerah. Saat ini Kabupaten Lampung Barat sedang memasuki periode bonus demografi, yaitu proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat terus meningkat dari 302.140 jiwa pada tahun 2020, menjadi 313.756 jiwa pada pertengahan 2024. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berada pada kelompok usia produktif. Kondisi ini membuka peluang untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, potensi bonus demografi ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila penduduk usia produktif mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, serta kesempatan kerja yang layak.

Di sisi lain, Kabupaten Lampung Barat juga mulai menghadapi fenomena *aging* population atau penuaan penduduk. Hal ini ditandai dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia (lansia) yang berdampak terhadap meningkatnya angka ketergantungan pada penduduk usia produktif. Jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat, peningkatan jumlah lansia berpotensi menimbulkan beban tambahan, baik dalam bentuk kebutuhan layanan kesehatan jangka panjang maupun perlindungan sosial.

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Barat hadir sebagai dokumen strategis yang memuat arah kebijakan dan rencana induk pembangunan kependudukan secara jangka panjang, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dokumen ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta kebijakan nasional terkait pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga. Melalui perencanaan yang komprehensif, diharapkan pembangunan kependudukan di Kabupaten Lampung Barat dapat berorientasi pada upaya mewujudkan penduduk yang tumbuh seimbang, berkualitas, serta mampu menjadi modal dasar pembangunan daerah.

Tujuan dari Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang menjadi acuan daerah untuk meningkatkan kuantitas penduduk, mempertahankan mobilitas mobilitas, distribusi yang serasi serta selaras dengan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya dokumen ini, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki acuan yang jelas untuk merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi pada optimalisasi bonus demografi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan tata kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan

Adapun Tujuan Strategis dari Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Barat adalah :

1. Menjaga struktur penduduk tumbuh seimbang;
2. Pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan,
3. kesehatan dan ketenagakerjaan;
4. Meningkatkan kualitas keluarga untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan masa depan yang sejahtera dan bahagia;
5. Distribusi penduduk yang seimbang secara spasial, ekologis dan sosial;
6. Memperluas cakupan administrasi kependudukan untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.

1.2.2. Sasaran

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 – 2029 diarahkan untuk mencapai sasaran :

1. Pengelolaan kuantitas penduduk
2. Peningkatan kualitas penduduk
3. Pembangunan Keluarga
4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk
5. Penataan administrasi data kependudukan

1.3. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai bahan dasar penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 452);

1.4. Batasan Pengertian

Batasan Pengertian dari penyusunan Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
b. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
c. Pembangunan Kependudukan adalah mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
d. Perkembangan kependudukan dan keluarga adalah Upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.

e. Keluarga adalah unit terkecil dalam yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
f. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
g. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
h. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
i. Perangkat Daerah adalah organisasi atau pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
j. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
k. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat dalahka, dalahkan, pekerjaan, produktivitas, Tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
l. Pembangunan Keluarga adalah mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
m. Penataan Persebaran Penduduk adalah menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya dukung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
n. Pengarahan mobilitas penduduk adalah mengarahkan dala keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya lingkungan.
o. Mobilitas Penduduk adalah dalam keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
p. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan sektor lain.

q. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah dokumen operasionalisasi GDPK selama 5 tahun yang memuat analisis situasi kependudukan, kebijakan dan strategi, sasaran, target per tahun, dan rencana aksi untuk mencapai target kependudukan.

r. Rencana Aksi adalah Langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, program, kegiatan dan penanggung jawab.

s. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil sedini mungkin.

t. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

1.5. Perkembangan dan Situasi Kependudukan di Kabupaten Lampung Barat

1.5.1. Jumlah Penduduk di Kabupaten Lampung Barat

Tabel 1.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020–2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Balik Bukit	41.600	41.690	41.780	45.520	43.925
2	Sukau	24.760	24.810	24.870	25.800	26.200
3	Lumbok Seminung	8.030	8.040	8.060	8.610	8.865
4	Belalau	12.490	12.520	12.540	12.620	12.705
5	Sekincau	18.870	18.910	18.950	19.270	19.388
6	Suoh	18.450	18.490	18.530	18.840	18.925
7	Batu Brak	14.990	15.020	15.050	15.330	15.515
8	Pagar Dewa	17.350	17.380	17.420	17.070	17.117
9	Batu Ketulis	13.370	13.390	13.420	13.740	13.837
10	Bandar Negeri Suoh	24.630	24.680	24.730	25.780	26.029
11	Sumber Jaya	24.040	24.090	24.140	24.250	24.386
12	Way Tenong	34.790	34.860	34.940	35.070	35.401
13	Gedung Surian	16.640	16.670	16.710	17.210	17.372
14	Kebun Tebu	20.500	20.540	20.580	21.390	21.526
15	Air Hitam	11.630	11.650	11.680	12.490	12.565
	Jumlah	**302.140**	**302.740**	**303.400**	**312.990**	**313.756**

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat tahun 2020–2024 menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk di seluruh kecamatan dengan kecenderungan pertumbuhan yang relatif stabil. Pada tahun 2020 jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat tercatat sebanyak 302.140

jiwa, dan meningkat menjadi 313.756 jiwa pada tahun 2024 dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,64 persen per tahun.

Kecamatan Balik Bukit dan Kecamatan Way Tenong merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, masing-masing sebesar 43.925 jiwa dan 35.401 jiwa pada tahun 2024. Sementara itu, Kecamatan Lumbok Seminung memiliki jumlah penduduk paling sedikit, yakni 8.865 jiwa pada tahun 2024, namun tetap mengalami peningkatan yang konsisten.

Kecamatan Sukau dan Bandar Negeri Suoh juga menunjukkan Kecenderungan serupa, dengan jumlah penduduk masing-masing mencapai 26.200 jiwa dan 26.029 jiwa pada tahun 2024. Secara keseluruhan, pertumbuhan penduduk yang relatif merata di semua kecamatan mencerminkan adanya dinamika demografi yang perlu dikelola secara bijak, baik dalam perencanaan pembangunan, penyediaan sarana prasarana, maupun dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.5.2. Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat

Tabel 2.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2024

No	Kecamatan	2020-2021	2020-2022	2020-2023	2020-2024
1	Balik Bukit	0,21	0,21	3,14	1,36
2	Sukau	0,21	0,21	1,40	1,37
3	Lumbok Seminung	0,14	0,21	2,40	2,57
4	Belalau	0,21	0,22	0,34	0,41
5	Sekincau	0,22	0,22	0,70	0,64
6	Suoh	0,21	0,22	0,70	0,57
7	Batu Brak	0,21	0,21	0,75	0,84
8	Pagar Dewa	0,20	0,21	-0,54	0,41
9	Batu Ketulis	0,18	0,22	0,93	0,80
10	Bandar Negeri Suoh	0,20	0,21	1,55	1,41
11	Sumber Jaya	0,19	0,21	0,30	0,40
12	Way Tenong	0,21	0,22	0,27	0,43
13	Gedung Surian	0,20	0,21	1,14	1,14
14	Kebun Tebu	0,18	0,21	1,45	1,22
15	Air Hitam	0,18	0,21	2,47	2,00
	Jumlah	**0,20**	**0,21**	**1,20**	**0,95**

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diproyeksikan sebanyak 319.310 jiwa, kemudian meningkat menjadi 334.760 jiwa pada 2030 dan 348.040 jiwa pada 2035. Kecenderungan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang konsisten dengan rata-rata kenaikan sekitar 2.800–2.900 jiwa per tahun.

Jika dirinci menurut kelompok umur, terlihat dinamika yang menarik. Pada kelompok usia muda (0–14 tahun), jumlah penduduk relatif stabil dengan kisaran 26–29 ribu jiwa per kelompok umur. Misalnya, kelompok usia 0–4 tahun berjumlah 29.000 jiwa pada 2025, sedikit menurun pada 2030 menjadi 28.080 jiwa, namun kembali meningkat hingga mencapai 27.630 jiwa pada 2035. Hal yang sama terlihat pada kelompok usia 5–9 tahun dan 10–14 tahun yang cenderung fluktuatif namun tetap berada pada angka di atas 26 ribu jiwa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran masih cukup stabil, sehingga jumlah anak-anak akan tetap menjadi kelompok signifikan dalam struktur penduduk Kabupaten Lampung Barat

Pada kelompok usia produktif (15–64 tahun), jumlah penduduk mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kelompok usia 20–24 tahun misalnya, dari 24.900 jiwa pada 2025 meningkat menjadi 25.660 jiwa pada 2030, dan sebesar 25.700 di tahun 2035. Begitu pula dengan kelompok usia 25–29 tahun yang pada 2025 berjumlah 24.310 jiwa, dan meningkat menjadi 25.190 jiwa pada 2035. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pada periode 2030–2040, Kabupaten Lampung Barat akan memasuki fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur penduduk. Situasi ini merupakan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, asalkan diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan lapangan pekerjaan.

Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) diproyeksikan tumbuh sangat cepat. Kelompok usia 65–69 tahun yang hanya 9.070 jiwa pada 2025, meningkat menjadi 13.640 jiwa pada 2035. Bahkan kelompok usia 75 tahun ke atas meningkat drastis dari 5.320 jiwa pada 2025 menjadi 10.070 jiwa pada 2035.. Fenomena ini menunjukkan terjadinya proses penuaan penduduk (*aging population*) di Kabupaten Lampung Barat, yang memerlukan perhatian khusus terutama pada aspek kesehatan, jaminan sosial, serta pelayanan kesejahteraan bagi lansia.

Secara keseluruhan, proyeksi ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Lampung Barat akan menghadapi dua tantangan besar sekaligus: di satu sisi memanfaatkan potensi bonus demografi dari meningkatnya penduduk usia produktif, dan di sisi lain menyiapkan strategi adaptif dalam menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia yang semakin besar

Gambar 1.

Piramida Laju Penduduk Kabupaten Lampung Barat



Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

1.5.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Perkembangan Jumlah penduduk menurut kelompok umur Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.

Penduduk Dirinci Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2024

Kelompok Umur	2023			2024		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	14.572	14.202	28.774	10.618	10.042	20.660
5 – 9	13.965	13.551	27.516	13.972	13.317	27.289
10 – 14	13.918	13.243	27.161	14.426	13.732	28.158
15 – 19	13.437	12.697	26.134	13.942	13.195	27.137
20 – 24	13.228	12.488	25.716	12.481	12.012	24.493
25 – 29	12.919	12.542	25.461	12.170	11.263	23.433
30 – 34	14.021	13.106	27.127	11.746	11.522	23.268
35 – 39	12.958	11.751	24.709	13.213	12.666	25.879
40 – 44	11.919	11.025	22.944	12.910	11.836	24.746
45 – 49	10.614	9.564	20.178	11.734	10.791	22.525
50 – 54	9.175	8.220	17.395	9.708	8.856	18.564
55 – 59	7.429	6.177	13.606	8.317	7.426	15.743
60 – 64	5.883	4.609	10.492	6.328	5.550	11.878
65 – 69	3.962	3.141	7.103	4.703	3.455	8.158
70 – 74	2.532	2.075	4.607	3.172	2.456	5.628
75+	2.046	2.020	4.066	3.300	2.897	6.197
Total	**162.578**	**150.411**	**312.989**	**162.740**	**151.016**	**313.756**

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

Distribusi penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023–2024 memperlihatkan struktur demografi yang relatif seimbang antara laki - laki dan perempuan, dengan tren pertumbuhan yang konsisten pada hampir seluruh kelompok umur. Pada tahun 2023 jumlah penduduk tercatat sebanyak 312.989 jiwa, terdiri atas 162.578 laki-laki dan 150.411 perempuan. Sementara pada tahun 2024 jumlah penduduk meningkat menjadi 313.756 jiwa, dengan komposisi 162.740 laki-laki dan 151.016 perempuan.

Distribusi penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwa proporsi terbesar berada pada kelompok usia produktif (15–64 tahun). Pada tahun 2024, kelompok usia produktif mencapai 69,37 persen dari total penduduk, yang mencerminkan adanya bonus demografi yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah apabila diiringi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, kelompok usia anak (0–14 tahun) masih menunjukkan jumlah yang cukup signifikan, yaitu 76.107 jiwa pada tahun 2024, sehingga menuntut penyediaan layanan dasar yang memadai, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) juga mengalami peningkatan dari 8.673 jiwa pada tahun 2023 menjadi 11.825 jiwa pada tahun 2024, menandakan adanya gejala awal penuaan penduduk (*aging population*) yang perlu diantisipasi dengan kebijakan jaminan sosial dan layanan kesehatan lansia.

Dengan demikian, dinamika perubahan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat pada periode 2023–2024 mencerminkan tantangan ganda, yakni bagaimana mengoptimalkan potensi produktivitas penduduk usia kerja sekaligus mempersiapkan kebijakan adaptif untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Oleh karena itu, pengelolaan kependudukan perlu diarahkan pada pembangunan manusia yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan aspek kuantitas dan kualitas penduduk dalam kerangka pembangunan daerah.

1.5.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Data penduduk Kabupaten Lampung Barat berdasarkan jenis kelamin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.
Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2024

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
1	Balik Bukit	22.565	21.360	43.925	105,60
2	Way Tenong	18.070	17.331	35.401	104,30
3	Sukau	13.526	12.674	26.200	106,70

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
4	Bandar Negeri Suoh	13.762	12.267	26.029	112,20
5	Sumber Jaya	12.612	11.774	24.386	107,10
6	Kebun Tebu	10.981	10.545	21.526	104,10
7	Sekincau	10.058	9.330	19.388	107,80
8	Suoh	9.924	9.001	18.925	110,30
9	Gedung Surian	8.957	8.415	17.372	106,40
10	Pagar Dewa	9.098	8.019	17.117	113,50
11	Batu Brak	8.042	7.473	15.515	107,60
12	Batu Ketulis	7.253	6.584	13.837	110,20
13	Belalau	6.580	6.125	12.705	107,40
14	Air Hitam	6.597	5.968	12.565	110,50
15	Lumbok Seminung	4.715	4.150	8.865	113,60
	Lampung Barat	**162.740**	**151.016**	**313.756**	**107,80**

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

Berdasarkan data tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat mencapai 313.756 jiwa, terdiri atas 162.740 laki-laki dan 151.016 perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 107,8. Angka ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan terdapat sekitar 108 laki-laki untuk setiap 100 perempuan, sehingga struktur penduduk relatif seimbang.

Jika dirinci menurut kecamatan, distribusi penduduk menunjukkan variasi yang tidak terlalu signifikan. Kecamatan Balik Bukit merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu 43.925 jiwa, terdiri atas 22.565 laki-laki dan 21.360 perempuan, dengan rasio jenis kelamin 105,6 yang menandakan jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Selanjutnya, Kecamatan Way Tenong menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk 35.401 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 104,3 yang mencerminkan keseimbangan sempurna antara laki-laki dan perempuan. Kecamatan Sukau memiliki penduduk sebanyak 26.200 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 106,7, menunjukkan bahwa laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Kondisi yang berbeda telihat di Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Pagar Dewa, Air Hitam dan Lumbok Seminung dengan rasio jenis kelamin diatas 110 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki jauh lebih banyak dibandingkan perempuan.

1.5.5. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) Dirinci Menurut Kecamatan

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan dalam suatu wilayah dan waktu tertentu. Jika rasio jenis kelamin lebih dari 100, berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jika rasio jenis kelamin kurang

dari 100, berarti jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jika rasio jenis kelamin sama dengan 100, berarti jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang. Dalam kurun waktu 2020-2024 rasio jenis kelamin (sex ratio) di Kabupaten Lampung Barat berada diangka lebih dari seratus, yang menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Gambaran rasio jenis kelamin (*sex ratio*) di Kabupaten Lampung Barat selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Dirinci Menurut Kecamatan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lumbok Seminung	112,80	112,60	113,60	113,60	113,60
2	Pagar Dewa	112,80	112,60	113,20	113,20	113,50
3	Bandar Negeri Suoh	113,10	113,00	112,60	112,60	112,20
4	Air Hitam	109,20	109,10	110,90	110,90	110,50
5	Suoh	111,10	111,00	110,60	110,60	110,30
6	Batu Ketulis	112,00	111,80	110,40	110,40	110,20
7	Sekincau	108,30	108,10	108,50	108,50	107,80
8	Batu Brak	109,10	109,00	108,00	108,00	107,60
9	Belalau	106,90	106,80	108,20	108,20	107,40
10	Sumber Jaya	105,70	105,60	107,80	107,80	107,10
11	Sukau	106,70	106,50	106,30	106,30	106,70
12	Gedung Surian	106,00	105,80	106,20	106,20	106,40
13	Balik Bukit	105,90	105,80	105,60	105,60	105,60
14	Way Tenong	104,60	104,50	104,20	104,20	104,30
15	Kebun Tebu	105,20	105,10	104,30	104,30	104,10
	Lampung Barat	**107,90**	**107,80**	**107,90**	**107,90**	**107,80**

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

1.5.6. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat konsentrasi penduduk di suatu daerah. Indikator ini penting karena dapat mencerminkan tekanan terhadap ketersediaan sumber daya, kapasitas layanan publik, serta kualitas lingkungan hidup. Variasi kepadatan penduduk antarwilayah umumnya dipengaruhi oleh faktor geografis, kondisi ekonomi, serta dinamika sosial masyarakat setempat.

Kepadatan penduduk yang tinggi dapat memberikan dampak ganda. Di satu sisi, dapat mendorong aktivitas ekonomi karena interaksi antarindividu yang lebih intensif. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, kepadatan yang berlebihan dapat menimbulkan tekanan pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan ketersediaan sarana serta prasarana dasar.

Selama lima tahun terakhir, kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan tren peningkatan sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Distribusi kepadatan tidak merata antar kecamatan. Kecamatan Kebun Tebu tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi, yakni 350 jiwa per km² pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya konsentrasi penduduk yang besar di wilayah tersebut, yang juga dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi, pariwisata, serta aksesibilitas wilayah. Sebaliknya, Kecamatan Batu Ketulis memiliki tingkat kepadatan terendah, yaitu 76 jiwa per km² pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa sebaran penduduk relatif lebih jarang dengan dominasi wilayah perdesaan dan bentang alam yang luas.

Gambaran mengenai kepadatan penduduk dirinci menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Barat selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6.

Kepadatan Penduduk (*Population Density*) Dirinci Menurut Kecamatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2024 (per km2)

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kebun Tebu	334	334	348	348	350
2	Balik Bukit	262	262	286	286	276
3	Way Tenong	269	269	270	270	273
4	Gedung Surian	217	217	224	224	226
5	Sumber Jaya	185	185	186	186	187
6	Sukau	170	170	177	177	179
7	Sekincau	164	165	167	167	168
8	Belalau	133	134	134	134	135
9	Suoh	123	123	125	125	126
10	Air Hitam	108	108	116	116	116
11	Bandar Negeri Suoh	92	93	96	96	97
12	Lumbok Seminung	81	81	87	87	90
13	Pagar Dewa	88	88	86	86	87
14	Batu Brak	75	76	77	77	78
15	Batu Ketulis	74	74	76	76	76
	Lampung Barat	**143**	**143**	**148**	**148**	**148**

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

1.5.7. Proyeksi Penduduk

Data Proyeksi penduduk sampai Tahun 2035 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.

Proyeksi Penduduk Laki-laki Tahun 2025-2035 Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Lampung Barat

Kelompok Umur	2025	2030	2035
0 – 4	14.800	14.330	14.100
5 – 9	13.800	14.550	14.090
10 – 14	13.230	13.570	14.310
15 – 19	13.280	13.110	13.450
20 – 24	12.780	13.120	12.950
25 – 29	12.500	12.540	12.870
30 – 34	12.220	12.280	12.320
35 – 39	13.130	11.880	11.940
40 – 44	12.100	12.720	11.510
45 – 49	11.170	11.770	12.380
50 – 54	9.880	10.810	11.390
55 – 59	8.400	9.400	10.290
60 – 64	6.600	7.760	8.700
65 – 69	5.010	5.850	6.900
70 – 74	3.130	4.130	4.850
75+	2.740	3.720	5.010
Total	**164.770**	**171.540**	**177.060**

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

Proyeksi pertumbuhan penduduk sampai Tahun 2035 menunjukkan tren pertumbuhan penduduk yang meningkat. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Lampung Barat diperkirakan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2025 hingga 2035. Pada tahun 2025, jumlah penduduk laki-laki diproyeksikan sebesar 164.770 jiwa, kemudian meningkat secara bertahap menjadi 171.540 jiwa pada tahun 2030 dan 177.060 jiwa pada tahun 2035. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan populasi laki-laki yang konsisten, meskipun dengan laju yang relatif moderat.

Jika ditinjau menurut kelompok umur, pola distribusi penduduk laki-laki memperlihatkan beberapa dinamika penting. Pada kelompok usia muda (0–14 tahun), jumlah penduduk relatif stabil sepanjang periode proyeksi, dengan kisaran 14 ribu jiwa pada masing-masing kelompok umur. Hal ini mencerminkan tren kelahiran yang cenderung stabil di wilayah ini.

Sementara itu, pada kelompok usia produktif (15–64 tahun), terlihat adanya pergeseran struktur umur. Misalnya, kelompok usia 20–24 tahun yang pada 2025 berjumlah 12.780 jiwa diproyeksikan meningkat hingga 12.950 jiwa pada 2035. Demikian pula kelompok usia 25–29 tahun, dari 12.500 jiwa pada 2025 naik menjadi

12.870 jiwa pada 2035. Kondisi ini menandakan bahwa pada periode 2030–2040, Kabupaten Lampung Barat akan memasuki fase bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif menjadi dominan.

Di sisi lain, jumlah penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) diperkirakan akan mengalami peningkatan cukup signifikan. Kelompok umur 65–69 tahun, misalnya, dari 5.010 jiwa pada 2025 meningkat menjadi 6.900 jiwa pada 2035. Demikian pula kelompok umur 75 tahun ke atas, yang semula 2.740 jiwa pada 2025, melonjak hampir tiga kali lipat menjadi 5.010 jiwa pada 2035. Tren ini menunjukkan adanya proses penuaan penduduk (*aging population*) yang perlu diantisipasi dengan kebijakan pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, dan penyediaan fasilitas yang ramah lanjut usia.

Secara keseluruhan, proyeksi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Lampung Barat akan menghadapi tantangan ganda, yakni memanfaatkan potensi bonus demografi pada satu sisi, sekaligus mempersiapkan diri menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia pada sisi lainnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah perlu diarahkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk laki-laki yang terjadi benar-benar memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 8.

Proyeksi Penduduk Perempuan Tahun 2025-2035 Dirinci Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Lampung Barat

Kelompok Umur	2025	2030	2035
0 – 4	14.200	13.760	13.530
5 – 9	13.560	14.080	13.640
10 – 14	12.960	13.460	13.980
15 – 19	12.660	12.870	13.370
20 – 24	12.120	12.550	12.750
25 – 29	11.800	11.900	12.320
30 – 34	11.740	11.470	11.570
35 – 39	12.320	11.460	11.200
40 – 44	11.140	12.130	11.290
45 – 49	10.430	10.960	11.940
50 – 54	9.020	10.220	10.750
55 – 59	7.660	8.750	9.930
60 – 64	5.650	7.300	8.350
65 – 69	4.060	5.200	6.740
70 – 74	2.610	3.540	4.570
75+	2.580	3.590	5.070
Total	**154.510**	**163.240**	**171.000**

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

Pada tahun 2025, jumlah penduduk perempuan diproyeksikan sebesar 154.510 jiwa, kemudian bertambah menjadi 163.240 jiwa pada tahun 2030 dan 171.000 jiwa pada tahun 2035. Pertumbuhan ini menunjukkan tren peningkatan yang relatif sejalan dengan proyeksi jumlah penduduk laki-laki, dengan laju pertumbuhan yang moderat.

Jika dirinci menurut kelompok umur, terlihat pola yang relatif konsisten. Pada kelompok usia muda (0–14 tahun), jumlah penduduk perempuan cenderung stabil dengan kisaran 12–14 ribu jiwa pada setiap kelompok umur. Hal ini mencerminkan tingkat kelahiran yang stabil, serupa dengan tren pada kelompok penduduk laki-laki.

Pada kelompok usia produktif (15–64 tahun), jumlah penduduk perempuan juga menunjukkan tren peningkatan. Misalnya, kelompok usia 20–24 tahun yang pada 2025 berjumlah 12.120 jiwa, meningkat menjadi 12.750 jiwa pada 2035. Kelompok usia 25–29 tahun juga menunjukkan pola serupa, dari 11.800 jiwa pada 2025 menjadi 12.320 jiwa pada 2035. Kondisi ini memperkuat indikasi bahwa pada periode 2030–2040, Kabupaten Lampung Barat akan berada pada fase bonus demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif, baik laki-laki maupun perempuan, mendominasi struktur penduduk.

Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kelompok usia 65–69 tahun meningkat dari 4.060 jiwa pada 2025 menjadi 6.740 jiwa pada 2035, atau mengalami kenaikan sebesar 66 persen. Bahkan, kelompok usia 75 tahun ke atas mengalami lonjakan yang lebih tajam, dari 2.580 jiwa pada 2025 menjadi 5.070 jiwa pada 2035, hampir dua kali lipat. Fenomena ini menunjukkan adanya tren feminisasi penduduk lanjut usia, di mana jumlah perempuan lansia umumnya lebih besar dibandingkan laki-laki akibat harapan hidup perempuan yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, proyeksi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Lampung Barat tidak hanya akan menghadapi peningkatan jumlah penduduk usia produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga lonjakan signifikan jumlah penduduk lanjut usia, terutama perempuan. Hal ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan kebijakan, terutama yang terkait dengan kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pelayanan sosial dan kesehatan bagi penduduk lanjut usia

Tabel 9.

Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2035 Dirinci Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Lampung Barat

Kelompok Umur	2025	2030	2035
0 - 4	29.000	28.080	27.630
5 - 9	27.360	28.630	27.730
10 - 14	26.190	27.040	28.290
15 - 19	25.950	25.980	26.810
20 - 24	24.900	25.660	25.700
25 - 29	24.310	24.440	25.190
30 - 34	23.960	23.750	23.890
35 - 39	25.450	23.340	23.140
40 - 44	23.240	24.850	22.800
45 - 49	21.610	22.730	24.320
50 - 54	18.900	21.030	22.140
55 - 59	16.060	18.150	20.220
60 - 64	12.250	15.060	17.050
65 - 69	9.070	11.040	13.640
70 - 74	5.740	7.670	9.420
75+	5.320	7.310	10.070
Total	319.310	334.760	348.040

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Barat diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, jumlah penduduk diproyeksikan sebanyak 319.310 jiwa, kemudian meningkat menjadi 334.760 jiwa pada 2030 dan 348.040 jiwa pada 2035. Tren ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang konsisten dengan rata-rata kenaikan sekitar 2.000 -3.000 jiwa per tahun.

Jika dirinci menurut kelompok umur, terlihat dinamika yang menarik. Pada kelompok usia muda (0–14 tahun), jumlah penduduk relatif stabil dengan kisaran 27–29 ribu jiwa per kelompok umur. Misalnya, kelompok usia 0–4 tahun berjumlah 29.000 jiwa pada 2025, sedikit menurun pada 2030 menjadi 28.080 jiwa yang selanjutnya mengalami penurunan menjadi 27.630 jiwa pada 2035. Hal yang sama terlihat pada kelompok usia 5–9 tahun dan 10–14 tahun yang cenderung fluktuatif namun tetap berada pada angka di atas 27 ribu jiwa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kelahiran masih cukup stabil, sehingga jumlah anak-anak akan tetap menjadi kelompok signifikan dalam struktur penduduk Kabupaten Lampung Barat.

Pada kelompok usia produktif (15–64 tahun), jumlah penduduk mengalami peningkatan. Kelompok usia 20–24 tahun misalnya, dari 24.900 jiwa pada 2025 meningkat menjadi 25.700 jiwa pada 2035. Begitu pula dengan kelompok usia 25–29 tahun yang pada 2025 berjumlah 24.310 jiwa, dan meningkat menjadi 25.190 jiwa pada 2035. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pada periode 2030–2040, Kabupaten Lampung Barat akan memasuki fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur penduduk. Situasi ini merupakan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, asalkan diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, dan lapangan pekerjaan.

Sementara itu, kelompok usia lanjut (65 tahun ke atas) diproyeksikan tumbuh sangat cepat. Kelompok usia 65–69 tahun yang hanya 9.070 jiwa pada 2025, meningkat menjadi 13.640 jiwa pada 2035 atau sebesar 50 persen. Bahkan kelompok usia 75 tahun ke atas meningkat drastis dari 5.320 jiwa pada 2025 menjadi 10.070 jiwa pada 2035 dengan kenaikan sebesar 89 persen. Fenomena ini menunjukkan terjadinya proses penuaan penduduk (*aging population*) di Kabupaten Lampung Barat, yang memerlukan perhatian khusus terutama pada aspek kesehatan, jaminan sosial, serta pelayanan kesejahteraan bagi lansia.

Secara keseluruhan, proyeksi ini memberikan gambaran bahwa Kabupaten Lampung Barat akan menghadapi dua tantangan besar sekaligus: di satu sisi memanfaatkan potensi bonus demografi dari meningkatnya penduduk usia produktif, dan di sisi lain menyiapkan strategi adaptif dalam menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia yang semakin besar.

Berdasarkan tabel proyeksi penduduk di atas, dapat dilihat bahwa penduduk pada usia produktif pada lima tahun kedepan akan mengalami peningkatan, dan lebih banyak penduduk usia produktif bila dibandingkan dengan penduduk bukan usia produksi, hal tersebut termasuk kedalam potensi bonus demografi. Dimana, bonus demografi adalah suatu kondisi di mana suatu negara atau daerah memiliki proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) yang lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lanjut usia).

1.5.8. Kelompok Penduduk Produktif dan Tidak Produktif

Jumlah penduduk produktif Kabupaten Lampung Barat pada periode 2020–2024 menunjukkan tren meningkat, dari 206.351 jiwa pada tahun 2020 menjadi 217.666 jiwa pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama terjadi pada kelompok usia menengah hingga tua (35–64 tahun), khususnya usia 45–49 tahun yang tumbuh cukup pesat, sementara kelompok usia muda (20–34 tahun) cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan di beberapa tahun. Kondisi ini mencerminkan adanya

pergeseran struktur usia produktif ke arah penuaan, di mana kontribusi tenaga kerja muda semakin berkurang. Dengan demikian, meskipun jumlah penduduk produktif masih dominan, kualitas dan daya saing tenaga kerja perlu diperkuat untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

Tabel 10.

Kelompok Penduduk Produktif Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2024

Kelompok Penduduk Produktif	2020	2021	2022	2023	2024
15 – 19	25.228	24.365	24.590	26.134	27.137
20 – 24	24.824	23.486	23.933	25.716	24.493
25 – 29	24.578	23.906	24.140	25.461	23.433
30 – 34	26.187	25.591	25.833	27.127	23.268
35 – 39	23.853	23.949	23.919	24.709	25.879
40 – 44	22.149	22.378	22.347	22.944	24.746
45 – 49	19.478	20.348	20.078	20.178	22.525
50 – 54	16.792	17.818	17.479	17.395	18.564
55 – 59	13.134	14.145	13.824	13.606	15.743
60 – 64	10.128	11.193	10.828	10.492	11.878
JUMLAH	**206.351**	**207.179**	**206.971**	**213.762**	**217.666**

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

Tabel 11.

Kelompok Penduduk Tidak Produktif Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2024

Kelompok Penduduk Tidak Produktif	2020	2021	2022	2023	2024
0 – 4	27.777	26.835	27.112	28.774	20.660
5 – 9	26.562	26.008	26.291	27.516	27.289
10 – 14	26.220	26.563	26.400	27.161	28.158
65 – 69	6.857	7.673	7.415	7.103	8.158
70 – 74	4.447	5.276	4.983	4.607	5.628
75+	3.925	4.397	4.225	4.066	6.197
JUMLAH	**95.788**	**96.752**	**96.426**	**99.227**	**96.090**

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Barat, 2025

Di sisi lain, jumlah penduduk tidak produktif juga terus meningkat dari 95.788 jiwa pada tahun 2020 menjadi 96.090 jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada anak usia 10–14 tahun serta kelompok lansia (65 tahun ke atas), sementara balita justru menurun yang menandakan terjadinya penurunan angka kelahiran. Hal ini menuntut strategi kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia usia produktif, penguatan layanan kesehatan dan jaminan sosial bagi lansia, serta upaya menjaga regenerasi tenaga kerja agar Kabupaten Lampung Barat dapat tetap memanfaatkan peluang bonus demografi dengan optimal.

1.5.9. Capaian Kependudukan di Kabupaten Lampung Barat

Tabel 12.

Capaian Indikator Kinerja Utama GDPK Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020-2024 Terhadap target Nasional

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian					Target Nasional 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Total Fertility Rate (TFR)	Tanpa satuan	N/A	2,39	2,51	2,48	2,47	1. Menurunkan TFR untuk wilayah dengan TFR di atas 2,1. 2. Mempertahankan TFR untuk wilayah dengan TFR = 2,1 anak per wanita. 3. Menghindari penurunan TFR yang berkelanjutan untuk TFR di bawah 2,1 anak per wanita
2	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	Tanpa satuan	N/A	N/A	49,21	32,8	32,7	<18
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi (*Demand Satisfied*)	%	N/A	N/A	N/A	N/A	99,2	
4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	Tahun	8,06	8,07	8,2	8,36	8,56	8,85
5	Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	Persentase Pekerja lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang bekerjadi bidang keahlian Menengah dan Tinggi	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita)							
	Prevalensi Stunting (SKI)	%	N/A	22,7	16,6	24,6	20,5	14
	Prevalensi Stunting (EPPGBM)	%	N/A	5,57	1,97	5,29	1,87	14
8	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 Kelahiran Hidup	2,9	4,55	1,1	2,28	2,29	
9	Kasus Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	72,4	145,6	36,1	38,04	114,33	
10	Persentase Penduduk Miskin	%	12,52	12,82	11,71	11,17	10,68	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	%	73	73,22	73,71	71,55	74,07	
12	Persentase Pekerja Informal	%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
13	Agregat Penduduk disabilitas berdasarkan jenis pekerjaan	Orang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	Gini Ratio	%	0,295	0,281	0,284	0,274	0,29	
15	PDRB Perkapita							
	ADHB	Miliar Rupiah	7.131.894	7.482.740	8.227.700	9.015.230	9.903.240	
	ADHK	Miliar Rupiah	4.926.295	5.053.324	5.256.950	5.502.920	5.742.840	
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,13	2,83	2,1	2,25	2,09	
17	Penambahan Wajib Pajak Hasil Extensifikasi							
	Persentase realisasi PAD	%	N/A	100	100	100	100	

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian					Target Nasional 2024
			2020	2021	2022	2023	2024	
18	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Indeks	N/A	52,51	55,82	60,31	61,52	>61
19	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	N/A	58,66	60,94	60,18	N/A	
20	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)							
	Cakupan rumah layak huni (Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Yang Layak)	%	39,78	45,76	45,55	43,34	N/A	15
21	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	%	N/A	0,43	0,43	0,43	0,43	11
	Rumah Tangga dengan akses sanitasi Layak (%)	%	97,14	98,52	92,07	99,65	99,71	15
22	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	59,4	
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	81,0	
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	76,61	78,95	87,46	96,85	98,58	
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	N/A	N/A	N/A	N/A	16,9	
26	Kepadatan Penduduk	/KM^2	143	143	143	148	148	
27	Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran Balita		N/A	N/A	99,90	99,98	99,98	100
	Cakupan Kepemilikan akta kelahiran anak (usia 0 - 18 tahun)	%	95,38	99,72	99,90	99,95	99,93	100
28	Cakupan kepemilikan akta cerai	%	100	100	100	100	100	
29	Cakupan kepemilikan akta nikah	%	100	100	100	100	100	
30	Cakupan kepemilikan akta kematian	%	100	100	100	100	100	

Sumber: Pemkab Kabupaten Lampung Barat, 2025

1.6. Isu Strategis Kependudukan di Kabupaten Lampung Barat

1.6.1. Pertumbuhan penduduk terus meningkat

Jumlah penduduk diproyeksikan meningkat dari 319.310 jiwa (2025) menjadi 348.040 jiwa (2035). Pertumbuhan Penduduk yang cepat berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, serta lapangan pekerjaan.

1.6.2. Pergeseran Struktur Umur (Bonus Demografi)

Pada periode 2025–2035, proporsi penduduk usia produktif (15–64 tahun) semakin besar dibandingkan usia nonproduktif. Hal ini membuka peluang bonus demografi, yang jika dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun, bila tidak, justru berpotensi menimbulkan pengangguran dan masalah sosial.

1.6.3. Penuaan Penduduk (Aging Population)

Tahun 2035 ditandai dengan peningkatan signifikan pada kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas), dari sekitar 32.380 ribu jiwa (2025) menjadi lebih dari 50.180 jiwa (2035). Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam pelayanan kesehatan, jaminan

sosial, serta kesiapan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi populasi lanjut usia.

1.6.4. Ketimpangan Kepadatan Penduduk antar Kecamatan

Kecamatan Kebun Tebu memiliki kepadatan hingga 350 jiwa/km² (2024), jauh lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Batu Ketulis yang hanya 76 jiwa/km². Ketimpangan ini menimbulkan perbedaan kebutuhan infrastruktur, distribusi layanan publik, dan tekanan terhadap lingkungan.

1.6.5. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan jumlah penduduk usia sekolah dan usia kerja menuntut peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, serta kesehatan. Tanpa peningkatan kualitas SDM, bonus demografi berpotensi tidak optimal.

1.6.6. Kerentanan Sosial dan Lingkungan

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan konsentrasi di wilayah tertentu berisiko menambah beban pada daya dukung lingkungan, ketersediaan lahan, serta potensi konflik sosial akibat perebutan sumber daya.

1.7. Analisis isu strategis dan respon kebijakan Menggunakan Metode PSRI (*Pressure, State, Respon and Impact*)

Analisis terhadap kondisi kependudukan di Kabupaten Lampung Barat berupa strategi dan respon kebijakan daerah serta capaian perkembangan dan permasalahan yang dihadapi memerlukan sebuah metode yang tepat. Salah satu metode yang dapat digunakan dalam analisis situasi ini adalah metode PSRI. PSRI adalah salah satu metode kerangka analisis yang digunakan untuk memahami hubungan antara tekanan (*Pressure*), kondisi (*State*), respon (*Response*) dan dampak (*Impact*) dari suatu isu/permasalahan strategis kependudukan untuk mempertajam perencanaan kependudukan.

Tujuan dari analisis dengan menggunakan PSRI ini adalah memberikan gambaran secara komprehensif terkait potret kependudukan suatu wilayah dan respon kebijakan yang diperlukan dan meningkatkan kualitas perencanaan kependudukan.

a. **Tujuan Umum Analisis PSRI**

Tujuan umum analisis menggunakan metode PSRI adalah memberikan gambaran secara komprehensif terkait potret kependudukan suatu wilayah dan respon kebijakan yang diperlukan serta meningkatkan kualitas perencanaan Pembangunan kependudukan pada Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)

1. Tujuan Khusus Analisis PSRI

1) Memahami hubungan antara tekanan kependudukan, kondisi saat ini, kebijakan yang diterapkan, dan dampak yang ditimbulkan.
2) Memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika kependudukan dan tantangan yang dihadapi
3) Membantu dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti dan data (evidence-based policy)
4) Mengevaluasi efektivitas kebijakan kependudukan yang telah diterapkan serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat
5) Mengoptimalkan intervensi kebijakan guna mencapai target Pembangunan nasional dan internasional, seperti SDGs dan Indonesia Emas 2045

2. Manfaat Analisis PSRI

Urgensi dan Manfaat Analisis PSRI) adalah sebagai berikut:

1) Membantu dalam identifikasi masalah secara sistematis: Memudahkan dalam mengidentifikasi faktor tekanan (Pressure) yang berkontribusi terhadap suatu permasalahan kependudukan.
2) Meningkatkan pemahaman terhadap kondisi yang terjadi: Membantu menganalisis keadaan (State) atau situasi kependudukan dengan menggunakan data yang valid dan terpercaya.
3) Menilai dampak dari kebijakan atau program yang dijalankan: Membantu mengukur efektivitas suatu intervensi kependudukan melalui analisis dampak (Impact).
4) Mempermudah penyusunan rencana aksi yang tepat: Memberikan arahan dalam menyusun respons (Response) berupa rencana aksi yang berbasis bukti dan dapat diimplementasikan secara efektif
5) Mempermudah evaluasi dan monitoring program: Dengan struktur yang jelas, PSRI dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan monitoring terhadap keberhasilan suatu program atau kebijakan berwawasan kependudukan.
6) Meningkatkan efektivitas pengambilan Keputusan: Memfasilitasi perencanaan kependudukan yang berbasis data sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
7) Mendorong koordinasi antar pemangku kepentingan: Membantu dalam menyelaraskan upaya dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan Pembangunan kependudukan yang lebih optimal.

1.7.1. Hasil Analisis PSRI Kabupaten Lampung Barat

Tabel 13.

Hasil Analisis Peta Jalan Kependudukan Menggunakan Metode PSRI di Kabupaten Lampung Barat

No	Indikator	Presure	State	Respons	Impact
P.1	**Pengendalian Kualitas Penduduk**				
1	Total Fertility Rate (TFR)	1. TFR masih tinggi 2. Masih rendahnya dukungan keluarga dalam ber-KB 3. Pengaruh suami melarang dikarenakan pemahaman tertentu. 4. Ada Sebagian masyarakat yang menunda-nunda untuk ber-KB sampai akhirnya hamil sebelum pakai alat KB. 5. Melakukan IUD masih dianggap tabu oleh sebagian masyarakat.	1. Capaian TFR Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sebesar 2,47 mengalami penurunan sebesar 0,01 dibandingkan tahun 2023 sebesar 2,48. Kondisi angka yang tinggi ini mengindikasikan peringatan SIAGA pada SIPERINDU 2. Posisi relatif TFR ini masih diatas capaian provinsi lampung (2,21) dan Nasional (2,11), Kondisi TFR ini perlu diturunkan agar tidak melebihi TFR tingkat Provinsi dan Nasional.	1. Melakukan edukasi terkait pentingnya program pengendalian penduduk (ber-KB) secara tepat dalam upaya pembangunan daerah. 2. Melakukan pelayanan KB gratis.	1. Angka kelahiran dapat dikendalikan. 2. Kuantitas dan kualitas penduduk optimal.
2	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	1. ASFR masih tinggi 2. Tingginya angka Pernikahan usia anak 3. Penyalahgunaan teknologi oleh remaja	1. ASFR ditahun 2024 sebesar 32,7 mengalami penurunan sebesar 0,1 dibandingkan tahun 2023 sebesar 32,8. Kondisi angka yang tinggi ini mengindikasikan peringatan SIAGA pada SIPERINDU. 2. Keadaan angka ASFR 15-19 Tahun ini jauh di atas angka Provinsi Lampung dan Nasional yaitu 18,0.	1. Menyusun regulasi dan menangani permasalahan pernikahan anak. 2. Mengoptimalkan peran Poktan BKR untuk mengedukasi kelompok remaja rentan. 3. Mengoptimalkan peran ayah.	Penurunan ASFR
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	1. Jumlah Unmet Need Kabupaten Lampung Barat Bulan Desember 2024 sebesar 2.236 Pasangan Usia Subur (PUS) dengan rincian tidak menjadi peserta KB dengan alasan ingin anak nanti/kemudian	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi saat ini masih di bawah 100% yaitu sebesar 99,2%. Hasil ini didapatkan dari pengurangan 100% dengan angka unmetneed	Memberikan penyuluhan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kepada PUS dengan Unmet Need dan Peserta KB Aktif dengan metode kontrasepsi tradisional	Semua PUS terlayani dan Demand satisfied 100%.

No	Indikator	Presure	State	Respons	Impact
		sebanyak 739 PUS dan tidak ingin anak lagi sebanyak 1.497 PUS 2. Data SIGA Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 112 Peserta KB Aktif menggunakan metode kontrasepsi tradisional			
P.2	**Peningkatan Kualitas Penduduk**				
P.2.1	**Pendidikan**				
4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	1. Rendahnya minat masyarakat, tidak menjadikan status pendidikan sebagai prioritas karena mereka lebih berfokus pada pekerjaan sebagai mata pencaharian sehari-hari 2. Rendahnya tingkat ekonomi rumah tangga, bila penduduk dilibatkan dalam kegiatan pertanian/ladang sejak usia muda, mereka lebih cepat berhenri sekolah 3. Ketimpangan akses pendidikan: Geografi, jarak ke sekolah, dan fasilitas yang terbatas di banyak kecamatan di Lampung Barat menjadi hambatan sehingga penduduk usia di atas 15 tahun masih memiliki rata-rata lama sekolah yang relatif rendah (8,56 tahun di 2024).	1. Angka rata-rata lama sekolah di Lampung Barat meningkat dari 8,06 tahun (2020) menjadi 8,56 tahun (2024). 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia 15 tahun ke atas rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan formal sampai sekitar sekolah menengah pertama (SMP) atau kelas atas SMP. 3. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan SMA secara umum, dan sangat sedikit yang mencapai perguruan tinggi.	1. Program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pengurangan hambatan ekonomi bagi keluarga kurang mampu. 2. Peningkatan kualitas pengajaran: pelatihan guru, fasilitas sekolah, dan lingkungan belajar yang kondusif. 3. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan melalui pendidikan kejar paket A, B dan C"	1. Dengan rata-rata lama sekolah naik (dari 8,56 tahun pada 2024 menjadi 9 tahun pada 2030), penduduk Lampung Barat akan memiliki tingkat pendidikan setara hampir lulus SMA. Ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis, literasi, dan numerasi masyarakat. 2. Pemerintah daerah akan lebih mudah mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena komponen pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) meningkat signifikan. 3. Terjadi transformasi pendidikan, dari sekadar pemerataan akses menjadi peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, menghasilkan generasi yang lebih terdidik, produktif, dan kompetitif.
5	Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi (%)	-	-	-	-

No	Indikator	Presure	State	Respons	Impact
6	Persentase penduduk bersertifikat keahlian				
	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Kualitas pelatihan umumnya masih rendah	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di tahun 2024 masih sedikit	1. Penyebaran informasi melalui berbagai media 2. Meningkatkan jenis pelatihan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi dan keterampilan diri dalam persaingan dunia kerja	Meningkatnya penduduk yang memiliki sertifikat keahlian
P.2.2	**Kesehatan**				
7	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	1. Pernikahan usia anak masih terjadi 2. ASFR 15-19 tahun masih tinggi 3. Prevalensi Stunting masih tinggi yaitu 20,5% (hasil SSGI tahun 2024) 4. Data/Sasaran (D/S) masih belum memenuhi target 5. Sasaran Balita masih banyak yang belum datang untuk dipantau tumbuh kembangnya di posyandu 6. Ketersediaan sarana prasarana Antropometri terstandar di posyandu hanya 1 (satu) unit	Prevalensi Stunting Kab. Lampung Barat tahun 2024 berdasarkan data SKI sebesar 20,50 % dan data EPPGBM sebesar 1,87% dengan capaian masih diatas Provinsi Lampung (15,9%) dan Nasional (19,8%)	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang memiliki balita untuk berkunjung ke posyandu setiap bulan 2. Memaksimalkan pelaksanaan program pemberian makanan tambahan berbahan baku lokal untuk sasaran ibu hamil dan balita dengan masalah gizi 3. Meningkatnya cakupan Data/Sasaran (D/S) posyandu 4. Meningkatnya kapasitas ketrampilan Kader 5. Meningkatnya jumlah sarana prasarana penunjang di posyandu (Antropometri sesuai dengan standar)	1. Terjadinya penurunan prevalensi stunting dibawah angka propinsi dan nasional 2. Terjadinya peningkatan capaian target Data/Sasaran (D/S) (diatas 70%) 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan posyandu
8	Angka Kematian Bayi (AKB)	1. Masih ditemukan kasus kematian bayi yaitu 12 kasus di tahun 2024	1. Terjadi penurunan kasus kematian bayi dari tahun sebelumnya yaitu 14 kasus tahun 2023 menjadi 12 kasus pada tahun 2024	1. Peningkatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Kabupaten Lampung Barat	1. Terjadinya penurunan kasus kematian bayi di Kabupaten Lampung Barat

No	Indikator	Presure	State	Respons	Impact
		2. Dengan kelahiran hidup 5248 maka Angka Kematian Bayi adalah 2,29 per 1.000 Kelahiran Hidup 3. Penyebab kematian bayi paling banyak terjadi karena kasus Berat Badan Lahir Rendah dan Gangguan pernafasan 4. Tempat kematian bayi paling banyak di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 5. Masih ditemukan penyebab kematian bayi karena 3 Terlambat	2. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Lampung Barat masih berada dibawah angka nasional yaitu 2,29 Per 1000 Kelahiran Hidup	2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan bayi baru lahir 3. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan bayi dengan kasus Berat Badan Lahir Rendah dan Gangguan pernafasan (Asfiksia) 4. Peningkatan cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional khususnya pada ibu hamil dan bayi baru lahir	2. Adanya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan bayi baru lahir 3. Adanya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan BBLR dan Gangguan pernafasan 4. Adanya peningkatan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 5. Adanya peningkatan kepesertaan JKN
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	1. Masih ditemukan kasus kematian ibu yaitu 6 kasus ditahun 2024 2. Penyebab kematian ibu paling banyak adalah karena kasus perdarahan 3. Tempat kematian paling banyak adalah di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan 4. Masih ditemukan penyebab kematian ibu karena 3 Terlambat	1. Terjadi peningkatan kasus kematian ibu dari tahun sebelumnya yaitu 5 kasus tahun 2023 menjadi 6 kasus ditahun 2024 3. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lampung Barat masih berada dibawah angka nasional yaitu 114,33 Per 100.000 Kelahiran Hidup	1. Peningkatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Kabupaten Lampung Barat 2. Peningkatan cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional khususnya pada ibu hamil dan bayi baru lahir	1. Terjadinya penurunan kasus kematian ibu di kabupaten Lampung Barat 2. Adanya peningkatan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan 3. Adanya peningkatan cakupan pelayanan kesehatan nasional
P.2.3	Ekonomi				
10	Tingkat Kemiskinan	1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten Lampung Barat di Tahun 2024 berada pada 10,68% 2. Kemiskinan saat ini berada pada desil 1 persentil 1 sampai 8 yang menjadi hambatan dalam intervensi penanggulangan kemiskinan	1. Capaian Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Lampung Barat tahun 2019 – 2024 menunjukkan garis tren menurun. 2. Berdasarkan data BPS, Persentase penduduk miskin (P0) tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,49 persen menjadi 10,68 persen dibandingkan tahun 2023 sebesar 11,17 persen	1. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan berkoordinasi dengan mensikronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 2. Menyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 sebagai pedoman dalam	Tingkat Kemiskinan Kabupate Lampung Barat ditargetkan turun sampai 7,20 sampai 8,25% di tahun 2030

No	Indikator	Presure	State	Respons	Impact
				penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat	
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita	1. Kab Lampung Barat, memiliki angka perkawinan usia anak yang cukup tinggi. Hal ini membuat banyak perempuan berhenti sekolah atau tidak masuk pasar kerja karena langsung menjadi ibu rumah tangga 2. Pelatihan vokasi dan keterampilan lebih banyak menyasar laki-laki (pertanian, perikanan, konstruksi), sementara peluang pelatihan bagi perempuan (misalnya menjahit, tata boga, UMKM) masih terbatas.	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sebesar 74,07 persen mengalami kenaikan sebesar 2,52 persen dan diatas Provinsi Lampung 54,58 persen 2. Perbandingan data tahun 2024 se Provinsi Lampung menunjukkan bahwa TPAK Perempuan Kab. Lampung Barat tertinggi se Provinsi Lampung	Meningkatkan kursus / pelatihan yang melibatkan peserta perempuan dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi dan keterampilan diri dalam persaingan dunia kerja	Meningkatnya Angka Partisipasi Angkatan kerja wanita
12	Persentase Pekerja Informal	-	-	-	-
13	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	-	-	-	-
14	Gini Ratio	1. Gini Rasio Tahun 2024 berada pada angka 0,29 2. Gini Rasio di Tahun 2024 meningkat menjadi 0,29 sedangkan P1 dan P2 mengalami Penurunan	Berdasarkan data BPS, koefisien gini Lampung Barat sebesar 0,29 masih dibawah nilai koefisien gini Provinsi Lampung sebesar 0,30 dan nasional sebesar 0,379	1. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan berkoordinasi dengan mensikronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 2. Menyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 sebagai pedoman dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat	Gini Rasio ditargetkan turun menjadi 0,280 - 0,272 di tahun 2030

No	Indikator	Presure	State	Respons	Impact
15	PDRB Perkapita	1. PDRB Perkapita tahun 2024 sebesaar 31,35 2. PDRB Perkapita ditahun stabil mengalami kenaikan semenjak tahun 2020-2024	PDRB Perkapita pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan pada tahun 2023, hal ini mengindikasikan intervensi yang dilakukan memberikan dampak positif setiap tahunnya	Melakukan sinkronisasi kegiatan pada perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi	PDRB perkapita ditargetkan mencapai 49,35 di tahun 2030
16	Tingkat Pengangguran Terbuka	Tidak imbangnya pertumbuhan angkatan kerja dengan kesempatan kerja	Tingkat Pengganguran Terbuka Kab Lampung Barat Tahun 2024 sebesar 2,09 persen yang mengalami penurunan sebesar 0,16 persen dibandingkan tahun 2023	1. Peningkatan Perencanaan Tenaga Kerja 2. Peningkatan Hubungan Industrial 3. Peningkatan Pelatihan dan Produktivitas Kerja 4. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	Pengangguran Terbuka Lebih sedikit lagi
17	Persentase Kepemilikan NPWP**				
	Persentase Penetapan Objek Pajak	1. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah; 2. Rendahnya tingkat pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap kesadaran pembayaran pajak yang tepat waktu; 3. Kurangnya kesempatan mengikuti pelatihan, bimbingan teknis serta pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur	Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2025 berkontribusi pada peningkatan Pajak Daerah yang bersumber dari Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.	1. Pendataan objek pajak, subjek pajak serta Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat membuat jumlah data yang ditetapkan menjadi meningkat 2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Pajak Daerah baik melalui media cetak media elektronik serta media sosial 3. Aparatur sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah secara daring "	Meningkatkan jumlah objek pajak yang ditetapkan yang kemudian berimplikasi peningkatan realiasi Pajak Daerah

No	Indikator	Presure	State	Respons	Impact
P.3	**Pembangunan Keluarga**				
18	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	1. Permasalahan keluarga dimulai dari usia dini, yakni masih terdapat balita stunting. 2. Permasalahan pada usia muda/usia produktif, masih adanya perkawinan dini di bawah usia 16 tahun dan masalah penyimpangan perilaku remaja. 3. Permasalahan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem juga masih menjadi permasalahan yang menghantui keluarga	Angka Indeks Pembangunan keluarga (iBangga) Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 sebesar 61,52 saat ini dibawah angka Provinsi Lampung (62,91) dan Nasional (62,4). Meskipun demikian angka ini sesuai dengan target RPJMN 2020-2024 dengan nilai normal jika >= 61,0.	Membangun konsolidasi dengan stakeholder terkait indikator iBangga dalam meningkatkan kualitas keluarga sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat.	Indeks Pembangunan Keluarga Tetap Normal
19	Indeks Perlindungan Anak	Masih ada kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, dan perundungan terhadap anak.	a Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 sebesar 60,18 saat ini dibawah angka Provinsi Lampung (64,78) dan Nasional (63,3).	Mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam RPJMD dan Renstra OPD.	Meningkatnya Perlindungan Anak
20	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1. Intervensi/penanganan terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) masih sangat sangat tergantung pada program/kegiatan yang dibiayai melalui APBN dan/atau DAK. 2. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum memungkinkan untuk melakukan intervensi yang signifikan pada sektor perumahan. 3. Belum ada pendanaan alternatif seperti coporate social responsibility (CSR), investasi swasta, atau sumber lainnya yang dapat mendorong pembangunan sektor perumahan di Kabupaten Lampung Barat.	1. Berdasarkan data terbaru Dinas PUPR (2022), jumlah RTLH adalah sebesar 5,69% dari total rumah yang ada di Kabupaten Lampung Barat. 2. Kondisi capaian ini masih berada di atas target nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yang menargetkan 70% rumah tangga Indonesia menempati hunian layak pada tahun 2024. 3. Program/kegiatan pembangunan fisik di sektor perumahan terakhir kali dilaksanakan pada tahun periode tahun 2020 - 2022, dengan jumlah kumulatif rumah yang dibangun/diintervensi sebanyak 1.844 unit rumah.	1. Penyusunan berbagai kriteria kesiapan / readiness cirteria agar Kabupaten Lampung Barat dapat mengikuti program/kegiatan di sektor perumahan, baik yang bersumber dari APBN, DAK, APBD Provinsi, maupun sumber dana lainnya. 2. Mengintegrasikan pembangunan sektor perumahan ke dalam beberapa dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Induk Penanganan Kawasan Kumuh dan dokumen lainnya yang relevan.	1. Pembangunan sektor perumahan dapat memenuhi atau bahkan melampaui target nasional dan provinsi. 2. Sektor perumahan dapat diintervensi dengan pendekatan pendanaan kolaboratif yang melibatkan berbagai stakeholder.

No	Indikator	Presure	State	Respons	Impact
			4. Pembangunan sektor perumahan tersebut di atas dibiayai melalui berbagai sumber yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK),		
21	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	1. Angka Capaian akses sanitasi aman masih relatif rendah 2. Keterbatasan kapasitas para stakeholder, baik pemerintah maupun swasta dalam mendorong percepatan capaian akses sanitasi aman 3. Sanitasi aman belum menjadi hal yang dianggap urgent oleh sebagian besar masyarakat. Masyarakat cenderung merasa cukup dengan kondisi sanitasi yang ada saat ini (dasar dan layak) 4. Sarana, prasarana, kelembagaan dan tata kelola yang diperlukan untuk mendukung capaian akses sanitasi aman	1. Akses sanitasi aman Kabupaten Lampung Barat saat ini baru mencapai 0,35%. 2. Capaian ini masih dibawah target Nasional dan target Provinsi Lampung yaitu sebesar 10% akses sanitasi aman pada tahun 2024 5. Hingga akhir tahun 2024, belum ada langkah signifikan dari semua stakeholder terkait untuk mendorong percepatan capaian akses sanitasi aman	1. Revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan lumpur tinja, yang antara lain mencakup : - Assessment kondisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) - Pengadaan/peminjaman truk tinja untuk uji coba pengoperasioan IPLT - Pelatihan operator IPLT 2. Pembentukan kelembagaan pengelola layanan lumpur tinja terjadwal 3. Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Air Limbah Domestik untuk disahkan menjadi Perda	Akses masyarakat terhadap sanitasi aman diharap dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD
22	Indeks Lansia Berdaya	1. Belum banyak wadah pemberdayaan lansia (seperti kelompok usaha lansia, komunitas produktif, atau pusat kegiatan lansia). 2. Rendahnya literasi membuat mereka sulit beradaptasi dengan teknologi digital maupun program pemberdayaan ekonomi modern	ks Lansia Berdaya mengukur kualitas hidup dan kemandirian lanjut usia dari sisi kesehatan, ekonomi, partisipasi sosial, serta perlindungan. Nilai 59,4 berarti kondisi lansia di Kabupaten Lampung Barat masih berada pada level "cukup" tetapi belum optimal", dan lebih rendah dibanding target nasional.	Mengoptimalkan pelaksanaan program "Lansia Berdaya" sebagai salah satu Quick Win Kemendukbangga / BKKBN	Meningatnya Indeks Lansia Berdaya
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiiki Remaja	1. Kurangnya pengetahuan orang tua tentang kebutuhan psikologis dan perkembangan remaja. 2. Ketidakhadiran orang tua karena pekerjaan	ks Pengasuhan Remaja di Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 sebesar 81,0	1. Melakukan Edukasi & Pelatihan Orang Tua (Parenting Remaja) 2. Penguatan Layanan Konseling Keluarga dan Remaja 3. Menyediakan Ruang Interaksi	Meningatnya Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiiki Remaja

No	Indikator	Presure	State	Respons	Impact
		3. Minimnya akses layanan konseling keluarga dan parenting 4. Pengaruh media sosial dan pergaulan bebas tanpa pengawasan memadai. 5. Kondisi sosial ekonomi yang keluarga yang dapat mengganggu kualitas pengasuhan.		Positif Keluarga Pendampingan Keluarga Rentan	
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	1. Terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mencover seluruh penduduk sebagai peserta JKN 2. pelaksanaan program JKN pada tataran pelayanan kesehatan	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah berhasil mencapai cakupan kepesertaan JKN hampir universal, dengan sekitar 98,58% penduduknya terdaftar pada Program Jaminan Kesehatan Nasional 2024	Penguatan JKN dan memastikan aksesibilitas serta kualitas layanan yang merata	Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
P.4.	**Penataan Persebaran Dan Pengarahan Mobilitas Penduduk**				
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	1. Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri sangat rendah 2. Masyarakat belum banyak mengetahui tentang keberadaan Kampung Berkualitas. 3. Operator website KKB tidak mengisi informasi, perkembangan dan intervensi di website 4. Kurangnya integrasi dan kolaborasi antar semua stakeholder yang terlibat dalam program-program KKB	1. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas klasifikasi Mandiri Kab Lampung Barat saat ini sangat rendah sekali yaitu 9,56%, dan sebanyak 69,85% KKB dengan klasifikasi Dasar dan Klasifikasi Berkembang 13,23% 2. Persentase KKB dengan klasifikasi mandiri di tingkat Nasional sudah mencapai 11,9% sedangkan di tingkat Provinsi Lampung jumlah KKB dengan klasifikasi mandiri sebesar 8%.	1. Menggalakkan informasi terkait keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan undang-undang yang sudah disahkan, terutama pada penyuluh lapangan kepada pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Desa serta masyarakat. 2. Mengisi semua data yang dibutuhkan dalam website KKB. 3. Mengadvokasi kepada semua stakeholder yang terlibat untuk berkomitmen dalam program-program yang ada pada KKB.	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri meningkat
26	Laju Pertumbuhan Penduduk	1. TFR masih tinggi 2. Ada Sebagian masyarakat yang menunda-nunda untuk ber-KB sampai akhirnya hamil sebelum pakai alat KB. 3. ASFR masih tinggi 4. Tingginya angka Pernikahan usia	Kepadatan Penduduk di Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 adlah 148 Jiwa/KM2 dengan pertumbuhan penduduk 1,11%	1. Melakukan edukasi terkait pentingnya program pengendalian penduduk (ber-KB) secara tepat dalam upaya pembangunan daerah. 2. Melakukan pelayanan KB gratis. 3. Menyusun regulasi dan	Terkendalinya Laju Petumbuhan Penduduk

No	Indikator	Presure	State	Respons	Impact
		anak 5. Jumlah Unmet Need Kabupaten Lampung Barat Bulan Desember 2024 sebesar 2.236 Pasangan Usia Subur (PUS) dengan rincian tidak menjadi peserta KB dengan alasan ingin anak nanti/kemudian sebanyak 739 PUS dan tidak ingin anak lagi sebanyak 1.497 PUS 6. Data SIGA Tahun 2024 menunjukkan sebanyak 112 Peserta KB Aktif menggunakan metode kontrasepsi tradisional		menangani permasalahan pernikahan anak. 4. Mengoptimalkan peran Poktan BKR untuk mengedukasi kelompok remaja rentan. 5. Mengoptimalkan peran ayah. 6. Memberikan penyuluhan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kepada PUS dengan Unmet Need dan Peserta KB Aktif dengan metode kontrasepsi tradisional	
P.5	**Integrasi Data Kependudukan**				
27	Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran Balita				
	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	1. Tingkat kesadaran makin tinggi karena diperlukan untuk pengurusan dokumen. Angka baseline data sudah 99,4% (usia penduduk 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran). 2. Kurang kesadaran untuk menyiapkan nama sebelum balita lahir, jadi asyar melakukan pencatatan, belum ada nama.	100% cakupan kepemilikan akta kelahiran terlapor	Melakukan sosialisasi, fasilitasi, bimtek, advokasi, monev peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran balita	Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kelahiran
28	Cakupan kepemilikan akta cerai				
	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Kondisi administrasi kependudukan membutuhan akta cerai, misalnya untuk keperluan menikah lagi, pengurusan bantuan sosial dll. Kondisi pengetahuan dan sosial ekonomi menyebabkan masyarakat belum sadar pada manfaat akta cerai.	100% cakupan kepemilikan akta kematian terlapor	Melakukan Sosialisasi, fasilitasi, bimtek, advokasi, monev peningkatan cakupan kepemilikan akta cerai	Meningkatnya cakupan kepemilikan akta cerai

No	Indikator	Presure	State	Respons	Impact
		Selama tidak dibutuhkan secara administrasi kependudukan, masyarakat belum memiliki kesadaran untuk melakukan update pencatatan.			
29	Cakupan kepemilikan akta nikah				
	Persentase Akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Kondisi administrasi kependudukan membutuhan akta nikah, misalnya untuk keperluan pendidikan anak, pengurusan bantuan sosial dll. Kondisi sosial ekonomi menyebabkan asyarakat menganggap cukup menikah secara agama, tanpa melakukan pencatatan pernikahan resmi.	100% cakupan kepemilikan akta perkawinan terlapor	Melakukan Sosialisasi, fasilitasi, bimtek, advokasi, monev peningkatan cakupan kepemilikan akta nikah	Meningkatnya cakupan kepemilikan akta nikah
30	Cakupan kepemilikan akta kematian				
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	1. Kondisi administrasi kependudukan membutuhan akta kematian, misalnya untuk keperluan administrasi, pengurusan bantuan sosial dll. 2. Jadi, data yang tercatat di Dukcapil adalah data kematian yang terlapor, tidak menggambarkan angka kematian penduduk sesungguhnya.	100% cakupan kepemilikan akta kematian terlapor	1. Melakukan sosialisasi, fasilitasi, bimtek, advokasi, monev peningkatan cakupan kepemilikan akta nikah 2. Memperkuat inovasi buku pokok kematian yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan	Meningkatnya cakupan kepemilikan akta kematian

Sumber: Pemkab Kabupaten Lampung Barat, 2025

BAB II

SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pada Bab ini akan menyajikan peta jalan pembangunan kependudukan yang merupakan arah kebijakan dan langkah strategis untuk mewujudkan penduduk sebagai modal pembangunan. Penyusunan peta jalan dilakukan melalui uraian kebijakan, strategi, indikator kinerja, dan target tahunan selama periode lima tahun, sesuai dengan sasaran utama pembangunan kependudukan.

Peta jalan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan program kependudukan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan, sehingga seluruh pemangku kepentingan dapat merujuk pada dokumen yang sama dalam pencapaian target pembangunan. Peta jalan ini disusun berdasarkan lima pilar utama pembangunan kependudukan, yaitu:

1) Pengendalian Kuantitas Penduduk
2) Peningkatan Kualitas Penduduk
3) Pembangunan Keluarga Berkualitas
4) Pembangunan Persebaran dan Mobilitas Penduduk
5) Penataan Administrasi Kependudukan

Masing-masing sasaran dijabarkan melalui kebijakan umum, Strategi Indikator Kinerja dan Target Tahunan (5 Tahun). Berikut adalah uraian kebijakan, strategi, indikator kinerja dan target tahunan selama lima periode dengan sasaran utama pembangunan kependudukan sebagai berikut:

Tabel 14.

Target Kinerja Peta Jalan Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Lampung Barat. tahun 2025-2029

No	Indikator	Satuan	RPJPD	RPJMD	RENSTRA	Baseline 2024	Target						Target RPJPD 2045	Urusan	Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Total Fertility Rate (TFR)	Angka		IKK - 11	Indikator Program Pengendalian Penduduk	2,47	2,46	2,46	2,65	2,44	2,43	2,42		Dinas PPKBPPPA	
2	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	Kelahiran per seribu perempuan			IKK - 3 Indikator Program Pengendalian Penduduk	32,7	32,4	32,3	32	31,7	31,5	31		Dinas PPKBPPPA	
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi														
	mCPR	Persen			Indikator Program Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)		75,5	75,6	75,7	75,8	75,9	76		Dinas PPKBPPPA	
	Demand Satisfied	Persen			Indikator Program Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	99,2	99,2	99,3	99,3	99,3	99,3	99,4		Dinas PPKBPPPA	Data Proyeksi BKKBN
4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	IUP Sasaran Misi 1 : Kualitas Pendidikan Tinggi dan Merata	IKD - 2.11	Indikator Sasaran 1 Renstra	8.56	8,6	8,6	8,7	8,8	8,9	9	11,38 - 11,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian														
-	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	Orang			Indikator Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	40	40	40	40	40	40		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
7	Prevalensi Stunting pada balita	Persen	IUP Sasaran Misi 1 : Kualitas Kesehatan Tinggi	IKU - 2 IKD - 2.3		20,5	17,8	17,22	16,37	15,9	15,43	14,96	0,5	Dinas Kesehatan	
8	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 Kelahiran Hidup			Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	2,29	3,6	3,6	3,5	3,4	3,3	3,1		Dinas Kesehatan	
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	IUP Sasaran Misi 1 : Kualitas Kesehatan Tinggi	IKD - II.2	Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	114,33	100	95	94	93	92	91		Dinas Kesehatan	
10	Tingkat kemiskinan	Persen	IUP Sasaran Misi 1 : Kemiskinan di Pedesaan dan Perkotaan Menjadi Berkurang	IKU - 7 IKD - 2.15		10,68	9,86 - 10,11	9,00- 9.63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25	0,8 - 1	Bappeda	
11	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	Persen	IUP Sasaran Misi 2 : Peningkatan kualitas Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	IKD - 2.29		41.56	41.98	42.40	42.82	43.25	43.68	44.12	82,33	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	

No	Indikator	Satuan	RPJPD	RPJMD	RENSTRA	Baseline 2024	Target						Target RPJPD 2045	Urusan	Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			
12	Persentase Pekerja Informal* Dalam proses pengusulan ke dalam SIPD														
-	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi (usia 15 tahun keatas yang bekerja format	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal														
-	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Gini Ratio	Angka		IKU - 8 IKD - 2.35		0,29	0,263	0.260	0,286 - 0,278	0,284 - 0,277	0,282 - 0,275	0,280 - 0,272		Bappeda	
15	PDRB Perkapita	Juta		IKU - 12 IKD - 2.33		31.35	33,68	37,35	40.35	43.35	46.35	49.35		Bappeda	
16	Tingkat pengangguran terbuka	Persen	IUP Sasaran Misi 2 : Peningkatan kualitas Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	IKU - 16 IKD - 2.28		2.09	1,90 - 2.08	1.75 - 2.05	1.70 - 2.02	1.60 - 1.99	1.50 - 1.98	1.40 - 1.95	1,3 - 1,6	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	
17	Penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi														
-	Persentase Penetapan Objek Pajak	Persen	-	-	Indikator Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6	8	8	8	8	8	8		Badan Pendapatan Derah	
18	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Angka	IUP Sasaran Misi 1 : Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	IKU - 6 IKD - 2.20	Indikator Tujuan Renstra "Meningkatnya Kualitas Keluarga"	61,52	61,83	62,14	62,45	62,76	63,07	63,39	74,8	Dinas PPKBPPPA	
19	Indeks Perlindungan Anak	Angka	IUP Sasaran Misi 1 : Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	IKU - 4 IKD - 2.21	Indikator Tujuan Renstra "Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif"	60,18 (2023)	63,92	64,92	65,92	66,92	67,92	68,92	83,92	Dinas PPKBPPPA	
20	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persen	IUP Sasaran Misi 2 : Pelayanan, Infrastruktur dan aksesibilitas air minum serta kebutuhan dasar yang memadai	IKD - 3.13		92.96	94.69	94.96	95.22	95.49	95.75	96.02	100	Dinas PUPR	
21	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	Persen	IUP Sasaran Misi 5 : Lingkungan Hidup Berkualitas dan luas lahan yang	IKD - 1.8		0,35	1,39	1,91	2,43	2,95	3,47	3,99	11,79	Dinas PUPR	Persen

No	Indikator	Satuan	RPJPD	RPJMD	RENSTRA	Baseline 2024	Target						Target RPJPD 2045	Urusan	Ket
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			
			direhabilitasi meningkat serta kualitas perairan sungai dan danau yang meningkat												
22	Indeks Lansia Berdaya	Indeks				59,4	60,1	60,8	61,5	62,1	62,8	63,4		Dinas PPKBPPPA	Data Proyeksi BKKBN
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks				81	82,6	84	85,3	86,5	87,6	88,6		Dinas PPKBPPPA	Data Proyeksi BKKBN
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	IUP Sasaran Misi 1 : Kualitas Kesehatan Tinggi	IKD - 2.6		98,58	99.50	99.55	99.60	99.65	99.70	99.75	100	Dinas Kesehatan	
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen			Indikator Sub Kegiatan 2.14.03.2.04.002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	16,9	18,1	19,2	20,1	21	21,8	22,5		Dinas PPKBPPPA	Data Proyeksi BKKBN
26	Rate Nett Recent Migrasi														
-	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen		IKU - 5 IKD - 1.12	Indikator Tujuan Renstra "Meningkatnya Kualitas Keluarga"	1,12	1,11	1,1	1,09	1,08	1,07	1,06		Dinas PPKBPPPA	
27	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita														
	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen			Indikator Program Pencatatan Sipil	-	100	100	100	100	100	100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
28	Cakupan Kepemilikan Akta Cerai														
	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen			Indikator Program Pencatatan Sipil	-	100	100	100	100	100	100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
29	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah														
	Persentase Akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen			Indikator Program Pencatatan Sipil	-	100	100	100	100	100	100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
30	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian														
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen			Indikator Program Pencatatan Sipil	-	100	100	100	100	100	100		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	
	JUMLAH INDIKATOR														

Sumber: RPJPD, RPJMD dan Renstra PD Kab Lampung Barat, 2025

Berdasarkan pemetaan indikator, terdapat perbedaan jumlah indikator pembangunan yang diadopsi dalam dokumen perencanaan daerah.

1. RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) memuat 11 indikator utama yang bersifat strategis dan jangka panjang. Indikator yang dimasukkan meliputi Rata-rata lama sekolah, Prevalensi Stunting pada balita, Angka Kematian Ibu, Tingkat kemiskinan, Tingkat partisipasi angkatan kerja Perempuan, Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Tingkat pengangguran terbuka, Cakupan rumah layak huni, Rumah tangga dengan akses sanitasi aman, Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional

2. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) lebih komprehensif dengan mencakup 15 indikator kunci. Indikator yang dimasukkan mencakup *Total Fertility Rate* (TFR), Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun, *Stunting*, Angka Kematian Ibu, Kemiskinan, TPAK Perempuan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Cakupan rumah layak huni, Rumah tangga dengan akses sanitasi aman, Cakupan Kepesertaan JKN dan Laju Pertumbuhan Penduduk.

3. Renstra OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah) mengadopsi 16 indikator kegiatan yang lebih teknis, misalnya Total Fertility Rate (TFR), Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun, Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi, Prevalensi Stunting pada balita, Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia diatas 15 Tahun, Pelatihan Berbasis Kompetensi, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Persentase Penetapan Objek Pajak, Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Perlindungan Anak, Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri, Laju Petumbuhan Penduduk, Persentase Kepemilikam Akta Pernikahan, Kelahiran, Perceraian dan Kematian

Tabel 15.

Rencana Aksi pada masing-masing Indikator Pembangunan kependudukan di Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029

No	Indikator	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Total Fertility Rate (TFR)	2,47	2,46	2,46	2,65	2,44	2,43	2,42	Pendataan Keluarga 2024 (PK 24)	Dinas PPKBPPPA	1. Melakukan edukasi terkait pentingnya program pengendalian penduduk (ber-KB) secara tepat dalam upaya pembangunan daerah. 2. Melakukan pelayanan KB gratis.
2	Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 Tahun	32,7	32,4	32,3	32	31,7	31,5	31	Pendataan Keluarga 2024 (PK 24)	Dinas PPKBPPPA	1. Menyusun regulasi dan menangani permasalahan pernikahan anak. 2. Mengoptimalkan peran Poktan BKR untuk mengedukasi kelompok remaja rentan. 3. Mengoptimalkan peran ayah.
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi									Dinas PPKBPPPA	Memberikan penyuluhan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kepada PUS dengan Unmet Need dan Peserta KB Aktif dengan metode kontrasepsi tradisional
	mCPR		75,5	75,6	75,7	75,8	75,9	76	Pendataan Keluarga 2024 (PK 24)		
	Demand Satisfied	99,2	99,2	99,3	99,3	99,3	99,3	99,4			
4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8,56	8,6	8,6	8,7	8,8	8,9	9	BPS	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. Dengan rata-rata lama sekolah naik (dari 8,56 tahun pada 2024 menjadi 9 tahun pada 2030), penduduk Lampung Barat akan memiliki tingkat pendidikan setara hampir lulus SMA. Ini meningkatkan kemampuan berpikir kritis, literasi, dan numerasi masyarakat. 2. Pemerintah daerah akan lebih mudah mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena komponen pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) meningkat signifikan. 3. Terjadi transformasi pendidikan, dari sekadar pemerataan akses menjadi peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, menghasilkan generasi yang lebih terdidik, produktif, dan kompetitif.
5	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Persentase Penduduk Bersertifikat Keahlian										

No	Indikator	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
-	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	-	40	40	40	40	40	40	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1. Penyebaran informasi melalui berbagai media 2. Meningkatkan jenis pelatihan yang dibutuhkan dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi dan keterampilan diri dalam persaingan dunia kerja
7	Prevalensi Stunting pada balita	20,5	17,8	17,22	16,37	15,9	15,43	14,96	e_ppgbm	Dinas Kesehatan	1. Meningkatnya kesadaran masyarakat yang memiliki balita untuk berkunjung ke posyandu setiap bulan 2. Memaksimalkan pelaksanaan program pemberian makanan tambahan berbahan baku lokal untuk sasaran ibu hamil dan balita dengan masalah gizi 3. Meningkatnya cakupan Data/Sasaran (D/S) posyandu 4. Meningkatnya kapasitas ketrampilan Kader 5. Meningkatnya jumlah sarana prasarana penunjang di posyandu (Antropometri sesuai dengan standar)
8	Angka Kematian Bayi (AKB)	2,29	3,6	3,6	3,5	3,4	3,3	3,1	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1. Peningkatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Kabupaten Lampung Barat 2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penatalaksanaan bayi baru lahir 3. . Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam penanganan bayi dengan kasus Berat Badan Lahir Rendah dan Gangguan pernafasan (Asfiksia) 4. Peningkatan cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5. Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional khususnya pada ibu hamil dan bayi baru lahir
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	114,33	100	95	94	93	92	91	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	1. Peningkatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) di Kabupaten Lampung Barat 2. Peningkatan cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3. Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional khususnya pada ibu hamil dan bayi baru lahir

No	Indikator	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
10	Tingkat kemiskinan	10,68	9,86 - 10,11	9.00-9,63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25	BPS	Bappeda	1. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan berkoordinasi dengan mensikronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 2. Menyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 sebagai pedoman dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat
11	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan	41.56	41.98	42.40	42.82	43.25	43.68	44.12	BPS	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Meningkatkan kursus / pelatihan yang melibatkan peserta perempuan dalam meningkatkan kemampuan, kompetensi dan keterampilan diri dalam persaingan dunia kerja
12	Persentase Pekerja Informal* Dalam proses pengusulan ke dalam SIPD										
-	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi (usia 15 tahun keatas yang bekerja formal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal										
-	Persentase penyandang disabilitas yang bekerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Gini Ratio	0,29	0,263	0.260	0,286 - 0,278	0,284 - 0,277	0,282 - 0,275	0,280 - 0,272	BPS	Bappeda	1. Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, dan berkoordinasi dengan mensikronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan 2. Menyusun Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2024 sebagai pedoman dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat
15	PDRB Perkapita	31.35	33,68	37,35	40.35	43.35	46.35	49.35	BPS	Bappeda	Melakukan sinkronisasi kegiatan pada perangkat daerah yang tergabung dalam Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
16	Tingkat pengangguran terbuka	2.09	1.90 - 2.08	1.75 - 2.05	1.70 - 2.02	1.60 - 1.99	1.50 - 1.98	1.40 - 1.95	BPS	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1. Peningkatan Perencanaan Tenaga Kerja 2. Peningkatan Hubungan Industrial 3. Peningkatan Pelatihan dan Produktivitas Kerja

No	Indikator	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
											4. Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja
17	Penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi										
-	Persentase Penetapan Objek Pajak	6	8	8	8	8	8	8	Badan Pendapatan Derah	Badan Pendapatan Derah	1. Pendataan objek pajak, subjek pajak serta Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat membuat jumlah data yang ditetapkan menjadi meningkat 2. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Pajak Daerah baik melalui media cetak media elektronik serta media sosial 3. Aparatur sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah secara daring
18	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,52	61,83	62,14	62,45	62,76	63,07	63,39	BKKBN	Dinas PPKBPPPA	Membangun konsolidasi dengan stakeholder terkait indikator iBangga dalam meningkatkan kualitas keluarga sehingga dapat meningkatkan kualitas masyarakat.
19	Indeks Perlindungan Anak	60,18 (2023)	63,92	64,92	65,92	66,92	67,92	68,92	BKKBN	Dinas PPKBPPPA	Mengintegrasikan isu perlindungan anak dalam RPJMD dan Renstra OPD
20	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	92.96	94.69	94.96	95.22	95.49	95.75	96.02	BPS	Dinas PUPR	1. Penyusunan berbagai kriteria kesiapan / readiness cirteria agar Kabupaten Lampung Barat dapat mengikuti program/kegiatan di sektor perumahan, baik yang bersumber dari APBN, DAK, APBD Provinsi, maupun sumber dana lainnya. 2. Mengintegrasikan pembangunan sektor perumahan ke dalam beberapa dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Induk Penanganan Kawasan Kumuh dan dokumen lainnya yang relevan.
21	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	0,35	1,39	1,91	2,43	2,95	3,47	3,99	BPS	Dinas PUPR	1. Revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan lumpur tinja, yang antara lain mencakup : 2. Assessment kondisi instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) 3. Pengadaan/peminjaman truk tinja untuk uji coba pengoperasioan IPLT 4. Pelatihan operator IPLT 5. Pembentukan kelembagaan pengelola layanan lumpur tinja terjadwal

No	Indikator	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
											6. Inisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Air Limbah Domestik untuk disahkan menjadi Perda
22	Indeks Lansia Berdaya	59,4	60,1	60,8	61,5	62,1	62,8	63,4	BKKBN	Dinas PPKBPPPA	Mengoptimalkan pelaksanaan program "Lansia Berdaya" sebagai salah satu Quick Win Kemendukbangga / BKKBN
23	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	81	82,6	84	85,3	86,5	87,6	88,6	BKKBN	Dinas PPKBPPPA	1. Melakukan Edukasi & Pelatihan Orang Tua (Parenting Remaja) 2. Penguatan Layanan Konseling Keluarga dan Remaja 3. Menyediakan Ruang Interaksi Positif Keluarga Pendampingan Keluarga Rentan
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	98,58	99.50	99.55	99.60	99.65	99.70	99.75	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Penguatan JKN dan memastikan aksesibilitas serta kualitas layanan yang merata
25	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	16,9	18,1	19,2	20,1	21	21,8	22,5	BKKBN	Dinas PPKBPPPA	1. Menggalakkan informasi terkait keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas sesuai dengan undang-undang yang sudah disahkan, terutama pada penyuluh lapangan kepada pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Desa serta masyarakat. 2. Mengisi semua data yang dibutuhkan dalam website KKB. 3. Mengadvokasi kepada semua stakeholder yang terlibat untuk berkomitmen dalam program-program yang ada pada KKB.
26	Rate Nett Recent Migrasi										
-	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,12	1,11	1,1	1,09	1,08	1,07	1,06	BPS	Dinas PPKBPPPA	1. Melakukan edukasi terkait pentingnya program pengendalian penduduk (ber-KB) secara tepat dalam upaya pembangunan daerah. 2. Melakukan pelayanan KB gratis. 3. Menyusun regulasi dan menangani permasalahan pernikahan anak. 4. Mengoptimalkan peran Poktan BKR untuk mengedukasi kelompok remaja rentan. 5. Mengoptimalkan peran ayah. 6. Memberikan penyuluhan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) kepada

No	Indikator	Baseline 2024	Target						Sumber Data	Dinas Terkait	Rencana Aksi
			2025	2026	2027	2028	2029	2030			
											PUS dengan Unmet Need dan Peserta KB Aktif dengan metode kontrasepsi tradisional
27	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Balita										
	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	-	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Melakukan sosialisasi, fasilitasi, bimtek, advokasi, monev peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran balita
28	Cakupan Kepemilikan Akta Ceral										
	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	-	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Melakukan Sosialisasi, fasilitasi, bimtek, advokasi, monev peningkatan cakupan kepemilikan akta ceral
29	Cakupan Kepemilikan Akta Nikah										
	Persentase Akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	-	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Melakukan Sosialisasi, fasilitasi, bimtek, advokasi, monev peningkatan cakupan kepemilikan akta nikah
30	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian										
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	-	100	100	100	100	100	100	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Melakukan sosialisasi, fasilitasi, bimtek, advokasi, monev peningkatan cakupan kepemilikan akta nikah Memperkuat inovasi buku pokok kematian yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan

Peta jalan dan Rencana Aksi Pembanguan Kependudukan di Kabupaten Lampung Barat untuk 5 tahun (2025–2029), dengan uraian kebijakan, strategi, indikator, dan target tahunan per sasaran sebagai berikut:

21. Sasaran I: Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang

1. Kebijakan: Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) dan edukasi pendewasaan usia perkawinan.
2. Strategi:
   a. Peningkatan akses dan kualitas layanan KB.
   b. Pendewasaan usia perkawinan.
   c. KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) yang responsif.
3. Indikator dan Target :

Tabel 16

Indikator dan Target : Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Total Fertility Rate (TFR)	2.46	2.46	2,65	2,44	2,43	2,42
2	ASFR 15–19 Tahun	32,4	32,3	32	31,7	31,5	31
3	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi	99,2	99,3	99,3	99,3	99,3	99,4

22. Sasaran II: Peningkatan Kualitas Penduduk

1. Kebijakan: Peningkatan pendidikan, kesehatan ibu dan anak, dan akses terhadap layanan dasar.
2. Strategi:
   a. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun.
   b. Menurunkan angka stunting dan kematian ibu/bayi.
   c. Memperluas cakupan jaminan kesehatan nasional.
   d. Menurunkan kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka
   e. Menurunkan rasio gini dan meningkatkan PDRB Perkapita
3. Indikator dan Target :

Tabel 17

Indikator dan Target : Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rata-rata lama sekolah	8,6	8,6	8,7	8,8	8,9	9
2	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	40	40	40	40	40	40
3	Prevalensi Stunting pada balita	17,8	17,22	16,37	15,9	15,43	14,96
4	Angka Kematian Bayi (AKB)	3,6	3,6	3,5	3,4	3,3	3,1
5	Angka Kematian Ibu (AKI)	100	95	94	93	92	91

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Tingkat kemiskinan	9,86 - 10,11	9.00 - 9.63	8,12 - 9,51	7,88 - 9,00	7,53 - 8,73	7,20 - 8,25
7	Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan	41.98	42.40	42.82	43.25	43.68	44.12
8	Gini ratio	0,263	0.260	0,286 - 0,278	0,284 - 0,277	0,282 - 0,275	0,280 - 0,272
9	PDRB Perkapita	31.35	33,68	37,35	40.35	43.35	46.35
10	Tingkat Pengangguran terbuka	1.90 - 2.08	1.75 - 2.05	1.70 - 2.02	1.60 - 1.99	1.50 - 1.98	1.40 - 1.95

23. Sasaran III: Pembangunan Keluarga yang Berkualitas

1. Kebijakan: Penguatan institusi keluarga melalui edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan.
2. Strategi:
   a. Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas.
   b. Edukasi pengasuhan remaja dan pencegahan KDRT.
   c. Penguatan indeks pembangunan keluarga dan anak.
   d. Meningkatkan rumah tangga layak dan rumaha tangga dengan sanitasi aman
   e. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional
3. Indikator dan target:

Tabel 18

Indikator dan Target : Pembangunan Keluarga yang Berkualitas

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,83	62,14	62,45	62,76	63,07	63,39
2	Indeks Perlindungan Anak	63,92	64,92	65,92	66,92	67,92	68,92
3	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	18,1	19,2	20,1	21	21,8	22,5
4	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	94.69	94.96	95.22	95.49	95.75	96.02
5	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	1,39	1,91	2,43	2,95	3,47	3,99
6	Indeks Lansia berdaya	60,1	60,8	61,5	62,1	62,8	63,4
7	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja	82,6	84	85,3	86,5	87,6	88,6
8	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional	99.50	99.55	99.60	99.65	99.70	99.75

24. Sasaran IV: Pemerataan Penduduk

1. Kebijakan: Meningkatkan distribusi penduduk melalui pengembangan wilayah dan penciptaan lapangan kerja.
2. Strategi:
   a. Penguatan Kampung Keluarga Berkualitas.
   b. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk
3. Indikator dan target:

Tabel 19

Indikator dan Target : Pemerataan Penduduk

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,11	1,1	1,09	1,08	1,07	1,06
2	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	18,1	19,2	20,1	21	21,8	22,5

25. Sasaran V: Tertib Administrasi Kependudukan

1. Kebijakan: Peningkatan cakupan dan kualitas dokumen kependudukan.
2. Strategi:
   a. Sosialisasi, fasilitasi, dan pelayanan akta secara proaktif.
   b. Integrasi layanan dokumen sipil dengan layanan dasar.
   c. Melakukan sosialisasi, fasilitasi, bimtek, advokasi, monev peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran, kematian, pernikahan dan kematian,
3. Indikator dan target:

Tabel 20

Indikator dan Target : Tertib Administrasi Kependudukan

No	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Akta Kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100	100	100	100	100	100

BAB III

RENCANA AKSI

3.1. Mekanisme Kerja Pelaksanaan Peta Jalan dan Rencana Aksi

Pelaksanaan Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan (PJPK) merupakan upaya strategis dan sistematis yang dijalankan secara bertahap, terencana, dan terintegrasi selama periode lima tahun, yaitu dari tahun 2025 hingga tahun 2029. Setiap tahapan pelaksanaan diarahkan untuk mencapai target indikator yang telah ditetapkan berdasarkan baseline awal dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029.

Agar pelaksanaan peta jalan ini berjalan secara efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas penduduk, maka dirancang suatu mekanisme kerja yang melibatkan seluruh perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Mekanisme kerja ini meliputi tiga komponen utama berikut:

A. Integrasi Perencanaan di Tingkat OPD dan Lintas Sektor

Setiap indikator pembangunan kependudukan yang telah ditetapkan dalam GDPK dan PJPK diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Integrasi ini dilakukan agar setiap OPD dapat merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta menjamin keselarasan antar sektor. Pendekatan integratif ini mencakup:

1. Penyesuaian indikator PJPK ke dalam Renstra OPD pengampu sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah di tentukan dalam rencana aksi
2. Penyusunan program prioritas lintas sektor dan disesuaikan dengan rencana kerja setiap tahunnya
3. Pembentukan forum koordinasi OPD untuk mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya

B. Penyusunan Program dan Kegiatan Berdasarkan Indikator Prioritas

Program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun harus merujuk pada indikator prioritas yang telah ditetapkan melalui PJPK. Penetapan indikator prioritas mempertimbangkan urgensi isu kependudukan, capaian target sebelumnya, dan kesiapan sumber daya pelaksana. Penyusunan program dilakukan dengan prinsip:

1. Responsif terhadap isu kependudukan yang aktual (misalnya: stunting, TFR, Pernikahan usia anak, angka kelahiran remaja, dan ketimpangan akses pendidikan dll)
2. Berbasis bukti (*evidence-based planning*)
3. Fokus pada peningkatan kualitas keluarga dan penduduk.

C. Monitoring dan Evaluasi Tahunan Berbasis Indikator Kinerja

Pelaksanaan program dan kegiatan harus dievaluasi secara berkala melalui sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja. Evaluasi ini dilakukan setiap tahun untuk mengukur capaian terhadap target yang telah ditetapkan, mengidentifikasi hambatan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan. Komponen evaluasi meliputi:

1. Pelaporan capaian indikator oleh masing-masing OPD,
2. Review tahunan melalui forum koordinasi teknis PJPK
3. Penyesuaian strategi pelaksanaan berdasarkan hasil evaluasi.

Dengan mekanisme kerja yang tertata dan sistematis ini, diharapkan pelaksanaan PJPK tahun 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen perencanaan, tetapi juga menjadi pedoman implementatif yang mampu menggerakkan seluruh potensi daerah dalam mewujudkan pembangunan kependudukan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

3.2. Kerangka Kelembagaan

Pelaksanaan PJPK tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan oleh satu Lembaga/OPD saja. Diperlukan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor, di mana masing-masing OPD memiliki peran dan tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Berikut adalah uraian operasional kerangka kelembagaan yang terlibat:

3.2.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan PJPK tahun 2025-2029 tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kolaborasi dan sinergitas lintas sektor. Dalam hal ini, Bappeda memiliki peran sentral sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

a. Mengintegrasikan GDPK ke dalam dokumen perencanaan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD).
b. Menyinergikan program dan kegiatan OPD terkait agar sejalan dengan sasaran pembangunan kependudukan.

c. Mengkoordinasikan lintas sektor untuk memastikan setiap OPD melaksanakan perannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
d. Memantau, mengevaluasi, dan melaporkan capaian pelaksanaan GDPK secara periodik.
e. Mendorong inovasi dan kolaborasi dengan lembaga non-pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung agenda kependudukan

3.2.2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) memiliki peran utama sebagai berikut:

a. Angka kelahiran total (total fertility rate) per wanita usia subur (15-49) tahun
b. Indeks pembangunan keluarga (iBangga)
c. Indeks pembangunan berwawasan kependudukan (IPBK)
d. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern
e. Persentase kehamilan tidak direncanakan (KTD)
f. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB).
g. Penguatan peran Kampung KB sebagai pusat layanan pembangunan keluarga.
h. Pengumpulan dan pelaporan indikator iBangga.

DP2KBP3A juga memiliki tugas operasional yang bisa dilaksanakan antara lain sebagai berikut:

a. Melaksanakan pelayanan KB (MKJP, non-MKJP) melalui posyandu dan klinik KB, PKB/PLKB.
b. Menyusun modul edukasi remaja untuk menurunkan angka ASFR (kelahiran usia 15–19).
c. Bekerja sama dengan desa dalam penguatan kelembagaan Kampung KB.
d. Menyusun dan melaporkan iBangga secara berkala.

3.2.3. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan memiliki peran utama dalam melaksanakan kerja sesuai dengan peta jalan pembangunan kependudukan yang telah diuraikan dalam rencana aksi pada bab sebelumnya sebagai berikut :

a. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan prevalensi stunting.
b. Menjamin cakupan JKN

3.2.4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki peran utama yaitu meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun dengan tugas operasional yang bisa dilaksanakan sebagai berikut:

a. Program beasiswa, bantuan biaya pendidikan, dan pengurangan hambatan ekonomi bagi keluarga kurang mampu.
b. Peningkatan kualitas pengajaran: pelatihan guru, fasilitas sekolah, dan lingkungan belajar yang kondusif.
c. Pelaksanaan pendidikan kesetaraan melalui pendidikan kejar paket A, B dan C.

3.2.5. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) memiliki peran utama dalam penyediaan sanitasi dan air bersih sebagai bagian dari lingkungan sehat dengan tugas operasional yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan berbagai kriteria kesiapan / readiness cirteria agar Kabupaten Lampung Barat dapat mengikuti program/kegiatan di sektor perumahan, baik yang bersumber dari APBN, DAK, APBD Provinsi, maupun sumber dana lainnya.
b. Mengintegrasikan pembangunan sektor perumahan ke dalam beberapa dokumen perencanaan strategis, seperti Rencana Induk Penanganan Kawasan Kumuh dan dokumen lainnya yang relevan.

3.2.6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran utama dalam menjamin kepemilikan dokumen kependudukan bagi seluruh penduduk. Adapun tugas operasional yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi, fasilitasi, bimtek, advokasi, monev peningkatan cakupan kepemilikan akta pernikahan, akta kelahiran balita, akta cerai dan akta kematian
b. Memperkuat inovasi buku pokok kematian yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan

3.2.7. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian memiliki peran utama dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), meningkatkan partisipasi kerja perempuan dan melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi.

3.2.8. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah memiliki peran utama dalam meningkatkan Persentase Penetapan Objek Pajak yang dicapai melalui tugas operasional yang dilaksanakan melalui :

a. Pendataan objek pajak, subjek pajak serta Wajib Pajak sehingga diharapkan dapat membuat jumlah data yang ditetapkan menjadi meningkat
b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Pajak Daerah baik melalui media cetak media elektronik serta media sosial
c. Aparatur sipil Negara pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan baik oleh pihak swasta maupun instansi pemerintah secara daring

3.3. Koordinasi dan Penguatan Kelembagaan

Menjamin integrasi dan efektivitas pelaksanaan, dibentuk Tim Koordinasi Pembangunan Kependudukan Daerah (TK-PKD) yang terdiri atas perwakilan masing-masing OPD. Tugas tim ini mencakup sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor, penyusunan laporan capaian dan kendala serta menyusun rekomendasi kebijakan tahunan berbasis hasil evaluasi.

Kerangka kelembagaan diperkuat dengan pembentukan tim koordinasi lintas OPD yang bertanggung jawab terhadap sinkronisasi dan pelaporan berkala. Pembangunan kependudukan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pelaksanaan PJPK tahun 2025-2029 harus didukung oleh kemitraan strategis lintas sektor melalui koordinasi, partisipasi, dan sinergi kebijakan serta program.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Pemantauan Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan

Pemantauan merupakan aktivitas untuk mengamati perkembangan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan rencana aksi. Pemantauan dilakukan dalam rangka mengidentifikasi serta mengantisipasi potensi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut dari target yang telah ditetapkan. Pemantauan bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kemajuan pelaksanaan program secara periodik.
2. Mengukur kesesuaian antara rencana dan realisasi implementasi kebijakan kependudukan.
3. Mendeteksi kendala dan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan rencana aksi.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi program kependudukan.

Pemantauan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksana PJPK yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam setahun dengan menyusun laporan berkala perkembangan pelaksanaan rencana aksi sebagai upaya pencapaian target-target pembangunan kependudukan. Proses pemantauan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pengumpulan Data: Menggunakan laporan dari instansi terkait, observasi langsung, serta survei kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
2. Analisis Data: Membandingkan data realisasi dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan dalam peta jalan.

4.2. Evaluasi Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan

Evaluasi merupakan kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap Peta Jalan dan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan. Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksana PJPK minimal 1 kali dalam setahun dengan menjelaskan capaian dari suatu program. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat lebih efektif dan efisien.

Pelaporan dilakukan untuk mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi, serta menyampaikan informasi kepada pihak terkait guna pengambilan keputusan yang lebih baik. Pelaporan ini menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pembangunan kependudukan yang lebih baik dan

berkelanjutan. Struktur pelaporan mencakup pendahuluan, hasil pemantauan dan evaluasi, kesimpulan dan rekomendasi.

Sebagai implementasi pelaksanaan peta jalan dan rencana aksi pada Kabupaten/Kota, pelaksanaan hasil pemantauan perlu dilaporkan kepada Sekretariat Tim Koordinasi Pelaksana PJPK. Pelaporan dilakukan secara berkala dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS